



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

SERTA

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagai amanat ketentuan pasal 17 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalam pasal 2 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan di dalam suatu sistem yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, dapat berupa:
 - a. terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. alokasi belanja daerah;
 - c. sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang telah mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran dimaksud harus dijelaskan dalam kolom

keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunsebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yang dapat digunakan antara lain untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - c. mendanai kegiatan lanjutan;
 - d. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

5. Keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan perubahan APBD yang kedua kali

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan KUA. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut diformulasikan oleh kepala daerah ke dalam perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan PPAS APBD berdasarkan perubahan RKPD.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Tarakan Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui integrasi antar program, kegiatan dan sub kegiatan menurut Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA-PD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode tahun anggaran sampai dengan akhir tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya ayat (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

1. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan
2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

1. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan asumsi kebijakan umum APBD (KUA) tahun 2025;
2. melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran, baik antar kegiatan, maupun antar jenis belanja.
3. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah;

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81);
 12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor .. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor ..);
 13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);
 14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 827);
 15. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026;

16. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025:
17. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
18. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Walikota Tarakan Nomor .. Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA

Penyajian penulisan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
- 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA
- 1.4 Sistematika

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN
- 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025
- 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja
- 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan
- 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN**BAB VIII. PENUTUP**

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Tarakan tahun 2025 berpedoman pada RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026 dan diselaraskan dengan RKP 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kerangka ekonomi makro tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Tarakan pada tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2025, masalah-masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada RPD tahun 2025-2026, Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Tarakan tahun 2025 sudah dirumuskan dalam Tujuan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah. Secara umum kondisi ekonomi Kota Tarakan dipengaruhi oleh kondisi capaian indikator makro ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.1 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional

Indonesia masih dihadapkan berbagai risiko ketidakpastian global dan berbagai resiko yang saling berinteraksi. Kebijakan moneter negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memasuki fase pengetatan dengan menaikkan suku bunga secara agresif guna meredam tekanan inflasi yang melonjak pasca pandemi Covid-19. Selain itu, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih dalam tahap negosiasi yang kompleks terkait dengan tarif impor, dimana

tarif impor oleh Amerika Serikat ini juga diberlakukan ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Dampak nyata dari ketidakpastian dan tekanan global ini terlihat pada harga komoditas utama. Harga minyak mentah dunia turun tajam ke level sekitar US\$65,3 per barel, jauh di bawah asumsi APBN sebesar US\$82 per barel. Dimana harga minyak sangat dipengaruhi oleh suasana geopolitik maupun *outlook* dari proyeksi perekonomian global yang melemah. Sementara itu, komoditas lain seperti batu bara, tembaga, dan nikel juga mengalami fluktuasi yang berdampak pada penerimaan negara.

Kebijakan moneter juga mencerminkan respons beragam terhadap ketegangan perdagangan dan prospek ekonomi. *Federal Reserve* AS memutuskan mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25 -4,50 persen dengan alasan potensi inflasi yang masih membayangi. Sebaliknya, *European Central Bank (ECB)* dan *Bank of England* menurunkan suku bunga masing-masing menjadi 2,4 persen dan 4,25 persen untuk meredam perlambatan pertumbuhan ekonomi di Eropa. Di sisi lain, Bank Sentral Tiongkok berupaya memberikan stimulus dengan menurunkan suku bunga sebesar 10 basis poin dan cadangan wajib bank (*reserve requirement ratio*) sebesar 50 basis poin, bertujuan mengatasi tekanan akibat tarif AS yang berpotensi melemahkan ekonominya.

Ditengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil. Kuartal pertama 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,87 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 54,5 persen. Capaian tersebut tentunya mampu membangun optimisme Indonesia untuk perekonomian yang lebih baik di tahun 2025.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,22 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,66 persen; Konstruksi sebesar 9,84 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,99 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,96 persen.

Inflasi nasional masih terkendali baik di level 1,95 persen (*yoy*) dengan core inflation ada di kisaran 2,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif stabil, meski terdapat beberapa fluktuasi pada komponen *volatile food* dan harga yang diatur pemerintah (*administered price*) akibat faktor musiman dan subsidi.

Dari sisi fiskal, hingga kuartal pertama tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan surplus fiskal sebesar Rp4,3 triliun atau setara 0,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus ini menandakan pengelolaan fiskal yang prudent meskipun di tengah ketidakpastian global dan domestik.

Pendapatan negara telah terealisasi sekitar 27 persen dari target APBN, sedangkan belanja negara mencapai sekitar 22,3 persen dari pagu.

Meskipun APBN dan indikator makro menunjukkan sinyal positif, pemerintah menyadari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penurunan harga komoditas utama seperti minyak, batu bara, dan nikel memberikan tekanan pada penerimaan negara, terutama pajak dan PNBPN.

Peningkatan investasi masih menjadi prioritas, mengingat pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal pertama hanya tumbuh 2,12 persen, relatif rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah terus mendorong percepatan belanja negara dan kebijakan pro-investasi untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah.

Penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama. Tambahan lapangan kerja di kuartal pertama menjadi kabar positif, meski tingkat pengangguran terbuka naik sedikit. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat program pengembangan tenaga kerja dan pelatihan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah.

Dukungan terhadap sektor manufaktur yang masih melemah harus terus diperkuat melalui stimulus fiskal dan kebijakan pendukung agar sektor ini kembali menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Percepatan belanja negara diarahkan untuk mengatasi tekanan di sektor konstruksi dan pertambangan yang masih relatif lemah, serta memastikan distribusi pembangunan yang merata ke seluruh daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

2.1.2 Kondisi Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kalimantan

Utara

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara kian membaik. Tercatat bahwa ekonomi Kalimantan Utara tahun 2024 tumbuh sebesar 4,57 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya nilai tambah pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan utama adalah Konstruksi. Sedangkan lapangan usaha yang memberikan *share* terbesar dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara adalah Pertambangan dan Penggalian .

Secara spasial, di wilayah Pulau Kalimantan, kontribusi ekonomi Provinsi Kalimantan Utara masih yang terendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Perekonomian di Pulau Kalimantan masih didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan *share* sebesar 47,29 persen. Sementara itu, *share* Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,09 persen.

Inflasi (*year-on-year*) Desember 2024 Provinsi Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan, Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Nunukan) sebesar 1,29 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi (*year-on-year*) pada Desember 2023. Penurunan ini dipicu penurunan harga terutama pada kelompok perumahan, air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Dari sisi perdagangan luar negeri, Provinsi Kalimantan Utara masih mengalami surplus sebesar US\$ 1.641,05 juta pada tahun 2024. Permintaan ekspor turun 10,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai US\$ 2.564,41 juta. Penurunan ini didorong oleh penurunan nilai ekspor hasil pertambangan. Di sisi lain ekspor hasil pertanian, industri pengolahan dan gas alam mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai impor mengalami peningkatan. Nilai impor Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2024 mencapai US\$ 923,36 juta.

Dari sektor perbankan tahun 2024, jumlah kantor bank di Provinsi Kalimantan Utara tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jenis bank di Provinsi Kalimantan Utara masih di dominasi oleh bank konvensional. Jenis kredit yang disalurkan berdasarkan penggunaan sebagian besar untuk kredit investasi, sedangkan berdasarkan lapangan usaha sebagian besar kredit disalurkan ke industri pengolahan.

Membaiknya kinerja perekonomian memberikan dampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan. Berdasarkan Survei Ketenagakerjaan Nasional yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2024, angka pengangguran menurun dari 4,01 persen pada 2023 menjadi 3,90 persen pada 2024. Selain berdampak pada kondisi ketenagakerjaan, membaiknya ekonomi Provinsi Kalimantan Utara juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2024 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurun dari 6,45 persen pada 2023 menjadi 6,32 persen pada 2024.

2.1.3 Kondisi Capaian Ekonomi Makro Kota Tarakan

Pada Perubahan KUA Tahun 2025, Kota Tarakan melakukan penyesuaian terhadap indikator makro ekonomi dengan memperhatikan kondisi, Nasional, Provinsi Kalimantan Utara dan capaian tahun 2024.

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah membawa kondisi perekonomian relatif lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa

yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Tabel 2.2

**Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan Tahun 2020-2024
dan Target Tahun 2025**

Uraian	Capaian					Target RKPD 2025	Proyeksi Perubahan RKPD 2025
	2020	2021	2022	2023*	2024**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,75	3,95	5,59	5,90	5,71	6,19	6,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2025, RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, (diolah)

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024, mencapai 27,11 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 25,65 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024, ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,71 persen, terjadi perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5,90 persen.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Sebanyak tiga belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar satu hingga sepuluh persen. Sementara itu, terdapat satu lapangan usaha yang tumbuh lebih dari sepuluh persen.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (%)

Kategori/ Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,31	3,24	6,68	6,05	0,52
B. Pertambangan dan Penggalan	-6,11	4,50	2,98	1,54	0,05
C. Industri Pengolahan	-3,75	2,91	4,12	2,80	1,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,29	5,66	7,66	18,79	2,74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,44	7,42	8,33	5,47	8,45
F. Konstruksi	0,20	-0,75	-2,58	9,34	9,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,36	9,56	8,32	7,25	9,51
H. Transportasi dan Pergudangan	-5,91	0,11	10,30	4,77	5,79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,34	1,36	12,25	7,52	11,05
J. Informasi dan Komunikasi	6,74	6,34	8,08	5,76	4,44
K. Jasa Keuangan	0,60	7,06	9,41	11,68	6,15
L. Real Estate	0,43	3,11	5,79	3,75	5,95
M,N. Jasa Perusahaan	-1,83	2,30	6,94	4,92	5,64
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,52	2,54	4,27	1,55	4,49
P. Jasa Pendidikan	4,47	4,99	7,24	5,24	7,51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,49	9,22	1,82	2,65	0,52
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,15	7,28	9,66	7,78	9,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-0,75	3,95	5,59	5,90	5,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan , 2025

2.1.3.2 Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan diiringi meningkatnya menurunnya ketimpangan pendapatan di masyarakat, Mengacu pada Oshima terdapat tiga kriteria ketimpangan:

- Ketimpangan rendah apabila nilai gini rasio $< 0,3$
- Ketimpangan sedang apabila nilai gini rasio $0,3 - 0,5$.
- Ketimpangan tinggi apabila nilai gini rasio $> 0,5$.

Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks gini Kota Tarakan berfluktuasi. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2022 adalah 0,267 artinya distribusi pengeluaran penduduk masih kurang merata jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2021. Namun pada tahun 2023 dan 2024 Indeks Gini Kota Tarakan terus menurun, berada di angka 0,253 pada tahun 2023 dan di angka 0,232 pada tahun 2024. Artinya distribusi pengeluaran di Kota Tarakan lebih baik dari tahun ke tahun. Secara umum, selama periode 2020-2024 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada dibawah angka 0,3 dengan kata lain pemerataan relatif tinggi atau merata.

Tabel 2.4
Capaian Rasio Gini Kota Tarakan Tahun 2020-2024
dan Target Tahun 2025

Uraian	Capaian					Target RKPD 2025	Proyeksi Perubahan RKPD 2025
	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rasio Gini	0,295	0,261	0,267	0,253	0,232	0,25	0,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2025, RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, (diolah)

2.1.3.3 Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan

meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi. Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Kota Tarakan pada bulan Desember 2024 mengalami inflasi *yoy* sebesar 1,6 persen.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,98 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,32 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,40 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,19 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,48 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,45 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,76 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok transportasi sebesar 0,21 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Desember 2024, antara lain: emas perhiasan, beras, bawang merah, minyak goreng, sawi hijau, kopi bubuk, kangkung, udang basah, telur ayam ras, dan krim wajah. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, angkutan udara, ikan bandeng/ikan bolu, bensin, ikan layang/ikan benggol, air kemasan, wortel, dan ikan senangin.

Tabel 2.5
Capaian Inflasi Kota Tarakan Tahun 2020-2024
Dan Target Tahun 2025

Uraian	Capaian					Target RKPD 2025	Proyeksi Perubahan RKPD 2025
	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Inflasi	1,15	2,83	3,93	2,46	1,6	2,5±1	2,5±1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2025, RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, (diolah)

2.1.3.4. Tingkat Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi hampir di setiap daerah termasuk Kota Tarakan.

Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat ditegorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Terdapat dua fase dalam perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Tarakan selama periode 2020-2024, yaitu fase peningkatan dan fase penurunan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan daripada tahun 2020. Setelah periode tersebut, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara bertahap. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan turun menjadi 15,32 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 1.170 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan membuahkan hasil, ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 5,56 persen, mengalami penurunan 0,54 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 6,10 persen.

Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 854.967,00/kapita/bulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan menurun dari 0,79 pada tahun 2023 menjadi 0,50 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari 0,19 menjadi 0,08. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2024 semakin menyempit dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.6
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	6,24	6,71	6,30	6,10	5,56
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	17.330	17.570	16.750	16.490	15.320
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp/Kap/Bulan	696.585	711.268	777.446	819.621	854.967
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,77	1,01	0,73	0,79	0,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,15	0,23	0,13	0,19	0,08

Sumber : BPS Kota Tarakan Tahun 2025

Tabel 2.7
Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2025

Uraian	Capaian					Target RKPD 2025	Proyeksi Perubahan RKPD 2025
	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Kemiskinan	6,24	6,71	6,30	6,10	5,56	5,8	5,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2025, RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, (diolah)

2.1.3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tabel 2.8
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2020-2024
dan Target Tahun 2025

Uraian	Capaian					Target RKPD 2025	Proyeksi Perubahan RKPD 2025
	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,86	4,94	5,76	5,25	5,11	5,00	5,00

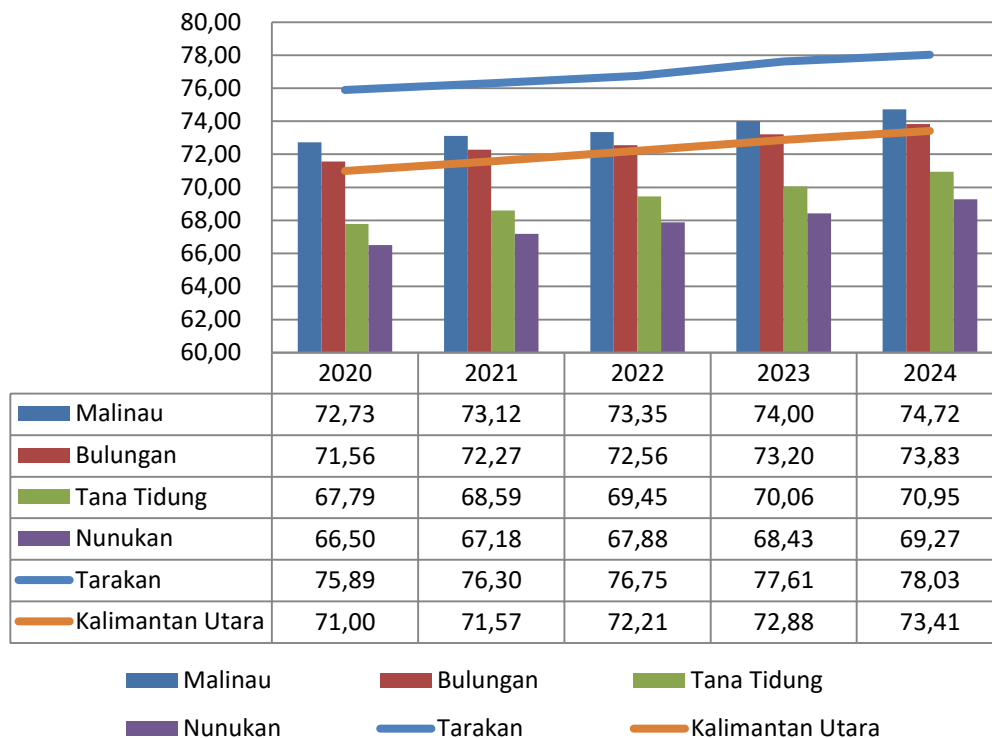
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2025, RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, (diolah)

Dalam kurun waktu 2020-2024 TPT Kota Tarakan berfluktuasi. TPT tahun 2024 di Kota Tarakan sebesar 5,11 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 sampai 6 orang yang menganggur. TPT Kota Tarakan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,14 poin jika dibandingkan tahun 2023. Penurunan TPT ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tarakan secara perlahan berhasil bertahan dan pulih dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, adanya program-program pengentasan pengangguran dari pemerintah juga berperan penting dalam pengentasan pengangguran.

2.1.3.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

IPM Kota Tarakan dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pembangunan manusia di Kota Tarakan.

IPM Kota Tarakan berada pada status “tinggi” dan masih tertinggi diantara kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai satu-satunya wilayah administrasi perkotaan di Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan memiliki berbagai fasilitas pembangunan yang lebih lengkap dan berkualitas. Hal tersebut menjadikan Kota Tarakan memiliki pembangunan manusia lebih baik dibandingkan 4 kabupaten lain. Capaian positif ini tidak menjadikan pemerintah kota “terlena” dalam pembangunan manusia karena peningkatan daya saing sumber daya

manusia harus terus dilakukan agar memiliki nilai lebih dalam kancah nasional bahkan internasional.

Tabel 2.9

**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan Tahun 2020-2024
dan Target Tahun 2025**

Uraian	Capaian					Target RKPD 2025	Proyeksi Perubahan RKPD 2025
	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPM	75,89	76,30	76,75	77,61	78,03	78,03	78,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2025, RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, (diolah)

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila melihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan, penyesuaian Silpa *Audited* dan melakukan efisiensi belanja, penggunaan belanja hanya untuk mendanai kebutuhan belanja prioritas.

Belanja yang menjadi prioritas pada perubahan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 adalah : pemenuhan kebutuhan belanja pegawai yang belum cukup tersedia anggarannya; pemenuhan belanja rutin dan mengikat seperti pembayaran air, listrik, telepon, dan internet; pembayaran kewajiban pemerintah daerah terhadap pekerjaan tahun-tahun sebelumnya yang telah selesai; pemenuhan belanja yang bersumber dari alokasi dana transfer dan SiLPA BLUD; pemenuhan belanja untuk perencanaan teknis yang dibutuhkan untuk pembangunan fisik tahun 2026; pemenuhan belanja yang termasuk kategori darurat dan mendesak serta pemenuhan belanja untuk pemulihan ekonomi dan sosial termasuk didalamnya pemenuhan belanja sesuai visi misi Kepala Daerah tahun 2025 - 2029.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen RKPD, KUA PPAS, dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, Infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Arah Kebijakan keuangan daerah meliputi tiga aspek yaitu: kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan secara detail dijelaskan pada Bab IV, V dan VI dalam dokumen Perubahan KUA APBD T.A 2025 berikutnya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, asumsi dasar yang digunakan antara lain meliputi asumsi dasar yang digunakan dalam Perekonomian Nasional Tahun 2025 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Stabilitas ekonomi makro terus dipertahankan dengan menjaga permintaan domestik agar mampu menopang perekonomian nasional. Reformasi struktural akan memperkuat fondasi perekonomian ke depan. Hal ini akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 5,2%.
2. Laju inflasi tahun 2025 terkendali dalam rentang sasaran target inflasi pada angka 2,5%, dikendalikan oleh optimalisasi peran APBN sebagai *shock absorber* serta koordinasi pengendalian inflasi diperkuat.
3. Terjaganya fundamental perekonomian domestik serta kebijakan pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* akan menopang kinerja pasar SBN *domestic* akan mendorong Tingkat Bunga SBN 10 Tahun pada angka 7%.
4. Kondisi perekonomian domestik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah pada angka Rp16.000,00
5. Pergerakan harga minyak di tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor geopolitik yang menekan permintaan dan distribusi, ditengah kebijakan peningkatan produksi oleh OPEC+. Diproyeksikan Harga Minyak Mentah Indonesia pada angka 82 US\$/barel.
6. Pemerintah terus berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan giant fields jangka

menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, optimalisasi sumur yang telah beroperasi melalui peningkatan kegiatan *drilling* dan *facility maintenance* serta perbaikan regulasi untuk menarik investor. Lifting Minyak diproyeksikan sebanyak 605 ribu barel per hari dan Lifting Gas sebanyak 1.005 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2
2	Inflasi	%,yoy	2,5
3	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	16.000
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	%	7,0%
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$/barel	82
6	Lifting Minyak Mentah	ribu barel per hari	605
7	Lifting Gas	ribu barel setara minyak per hari	1.005

Sumber : Siaran Pers SP-42/KLI/2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia.

Dalam menyusun APBD, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan penyesuaian antara target indikator makro daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Kalimantan Utara, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1 Perekonomian Kalimantan Utara

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 146,79 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,49 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 147,28 triliun rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh adanya penurunan harga komoditas batubara dan komoditas perikanan pada tahun 2024.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan dari 69,82 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 73,01 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,57 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi

Struktur Ekonomi : Selama lima tahun terakhir (2020–2024) struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan penggalian; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Utara.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 28,72 persen (meningkat dari 25,46 persen pada tahun 2020). Selanjutnya Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,78 persen (menurun peranannya dari 16,47 persen pada tahun 2020); selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,99 persen (menurun dari

14,27 persen pada tahun 2020). Konstruksi sebesar 12,94 persen (menurun dari 14,27 persen di tahun 2020); dan lapangan usaha Industri Pengolahan 8,15 persen (angka ini menurun dari 9,17 persen di tahun 2020).

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Penggalan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori yang mengalami peningkatan peranan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2020. Sebaliknya Pertanian; Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; dan Industri Pengolahan peranannya mengalami penurunan. Sementara itu peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 7,5 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (*y-on-y*) : Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,06 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalan yang berkontraksi sebesar 0,06 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,89 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 10,63 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,34 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 0,53 persen dan 9,08 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Utara masih didominasi oleh Lapangan Pertambangan dan Penggalan sebesar 28,67 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,94 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,56 persen; Konstruksi sebesar 12,03 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 8,69 persen. Peran kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Utara mencapai 77,89 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (*q-to-q*) : Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 3,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam diantaranya Konstruksi sebesar 15,69 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,37 persen, dan Jasa Perusahaan sebesar 4,77 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Industri Pengolahan sebesar 3,16 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,85 persen.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial Triwulan I-2024 : Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2025 masih menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,43 persen terhadap PDB; diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,14 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,95 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,71 persen; Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 di sebagian besar provinsi mengalami peningkatan. Jika dilihat menurut pulau, pertumbuhan (*y-on-y*) yang tertinggi terjadi di Kawasan Pulau Sulawesi sebesar 6,40 persen. Selanjutnya, Pulau Jawa sebesar 4,99 persen; Pulau Sumatera sebesar 4,85 persen; Pulau Kalimantan sebesar 4,32 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,12 persen; dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,69 persen.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Kalimantan Utara. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara

Selama tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuatif, hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin. Peningkatan penduduk miskin

terbesar terjadi pada Maret 2020, dengan jumlah peningkatan penduduk miskin sebesar 3,18 ribu jiwa. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin adalah 48,61 ribu jiwa (6,49 persen) kemudian menjadi 51,79 ribu jiwa (6,80 persen) pada bulan Maret 2020. Sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin terbesar terjadi pada Maret-September 2024, yaitu sebesar 6,72 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 adalah sebesar 47,83 ribu jiwa (6,32 persen), menjadi 41,11 ribu jiwa pada September 2024 (5,38 persen). Pada September 2020, diakibatkan oleh pandemi Covid-19 terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 0,9 ribu jiwa menjadi 52,70 ribu jiwa (7,41 persen). Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin terjadi kembali pada September 2022 dengan kenaikan sebesar 0,09 persen (1,11 ribu jiwa). Apabila ditinjau dari wilayah perdesaan dan perkotaan, masih terdapat disparitas jumlah penduduk miskin. Presentase penduduk miskin lebih banyak berada di daerah perdesaan. Pada Maret 2024, penduduk miskin di daerah perkotaan adalah 4,73 persen sedangkan di daerah perdesaan adalah 9,23 persen. Namun demikian di bulan september 2024 persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan signifikan menjadi 5,96 persen. Apabila dilihat dari wilayah Kabupaten/Kota, Kota Tarakan memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu 15,32 ribu jiwa pada Tahun 2024. Sedangkan Persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Bulungan dengan persentase sebesar 8,76 persen pada Tahun 2024. Disamping itu, Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terkecil di Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan merupakan wilayah dengan garis kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Rp. 854.967 pada bulan Maret 2024. Sedangkan garis kemiskinan terkecil adalah Kabupaten Tana Tidung dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 518.696 pada kondisi Maret 2024.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Beberapa indikator sosial dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut diantaranya adalah indikator terkait ketenagakerjaan. Semakin banyaknya masyarakat yang terserap dalam lapangan kerja, mengindikasikan bahwa masyarakat hidup semakin sejahtera karena adanya kesempatan kerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tabel 3.2
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Utara, Februari 2022– Februari 2024

Uraian	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Penduduk Usia Kerja	542.340	556.553	555.547
B. Angkatan Kerja	349.892	373.069	358.450
• Bekerja	333.718	357.777	344.064
• Pengangguran	16.174	15.292	14.386
C. Bukan Angkatan Kerja	192.448	183.484	197.097
TPAK (%)	64,52	67,03	64,52
TPT (%)	4,62	4,10	4,01

Sumber: Berita Resmi Statistik No.30/05/65/Th.X, 06 Mei 2024, BPS Provinsi Kalimantan Utara

c. Inflasi di Kalimantan Utara

Pada tahun 2024 inflasi sebesar 1,29 persen merupakan angka terendah selama lima tahun terakhir. Angka inflasi pada tahun 2024 mengalami penurunan setelah sebelumnya mengalami penurunan juga ditahun 2023 yaitu sebesar 2,44 persen. Pada tahun 2022 angka inflasi sebesar 4,74 persen yang merupakan angka inflasi tertinggi dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020 dan 2021 angka inflasi berturut-turut pada angka 1,32 persen dan 2,73 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Kalimantan Utara diukur menggunakan Rasio Gini. Angka Rasio Gini di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir

berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,264. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2023 sebesar 0,277. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Kalimantan Utara Tahun 2024 ditargetkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target Indikator Ekonomi Daerah Kalimantan Utara Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 - 6
3	Inflasi	%	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,9 - 4
5	Angka Kemiskinan	%	5,80 - 5,70
6	Rasio Gini	%	0,263 - 0 281

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

3.1.2 Perekonomian Kota Tarakan

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024, mencapai 27,11 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 25,65 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024, ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,71 persen, terjadi perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,90 persen.

Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 56,21 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3,94 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Sesuai dengan prospek ekonomi di tingkat global, nasional, dan Provinsi Kalimantan Utara, prospek perekonomian Kota Tarakan tahun 2025 diperkirakan terus membaik didorong dengan peningkatan produktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mampu mencapai 6,19 % pada tahun 2025. Kinerja pertumbuhan ekonomi terutama didorong kinerja sektor-sektor usaha. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pada semua lapangan usaha, dimana yang paling besar adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 11,05 persen. Pertumbuhan pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum didorong oleh meningkatnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel dan meningkatnya jumlah usaha penyediaan makan minum pada tahun 2024.

Lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 1 hingga 10 persen, diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 9,51 persen, Jasa Lainnya tumbuh sebesar 9,39 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 9,07 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 8,45 persen, Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 7,51 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 6,15 persen, Real Estate tumbuh sebesar 5,95 persen, Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 5,79 persen, Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 5,64 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 4,49 persen, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 4,44 persen, disusul Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 2,74 persen, serta Industri Pengolahan tumbuh sebesar 1,94 persen.

Sementara itu lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan positif di bawah 1 persen diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,52 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 0,52 persen dan Lapangan Usaha Pertambangan

dan Penggalian tumbuh sebesar 0,05 persen. Lapangan usaha yang tumbuh kurang dari 1,00 persen yang diproyeksikan terus membaik.

Angka kemiskinan Kota Tarakan tahun 2024 sebesar 5,56 persen, mengalami penurunan 0,54 poin dibandingkan tahun 2023 . Penurunan kemiskinan didukung oleh berbagai program penanggulangan kemiskinan yang mengarah pada pengurangan beban penduduk miskin melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan masyarakat dan UMKM, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur dan lingkungan kawasan kumuh.

Secara rinci target indikator makro ekonomi Kota Tarakan pada tahun 2025 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4 Target Indikator Makro Ekonomi
Kota Tarakan Tahun 2025**

No	Indikator	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,19
2	Inflasi (Persen)	2,5±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,00
4	Persentase penduduk miskin (Persen)	5,8
5	Indeks Pembangunan Manusia	78,03

Sumber: RKPD Kota Tarakan Tahun 2025

3.3. LAIN-LAIN ASUMSI

Asumsi dasar dalam menyusun Perubahan APBD Kota Tarakan Tahun 2025 tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah daerah dalam penganggaran, yaitu;

- Penyesuaian Pendapatan daerah
- Penyesuaian SiLPA yang diaudit
- Penyesuaian penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

- d. Penyesuaian belanja daerah sebagai dampak dari perubahan pendapatan daerah dan koreksi pada belanja transfer dari pemerintah pusat;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang bersifat Desentralisasi Fiskal secara bertanggungjawab merupakan salah satu bentuk terjemahan dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penjabaran yang lain dapat dijelaskan bahwa pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah dimaksud terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang berlaku tanggal 5 Januari 2022 diharapkan memberikan penguatan *local taxing power* dengan tetap menjaga perekonomian dan

kemudahan berusaha di daerah dengan cara menurunkan *administration dan compliance cost*, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain serta memberikan perluasan objek pajak dan retribusi serta memberikan diskresi dalam penetapan tarif agar kemandirian daerah meningkat. Kemandirian daerah dicerminkan oleh meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pendapatan Daerah yang diproyeksikan pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Tarakan melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan yang terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan daerah. Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan antara lain melalui kerjasama dengan berbagai pihak antara lain BPD Kaltimara, BRI, BPN, KPP Pratama maupun pihak lain seperti *market place dan e-commerce* dalam hal pemungutan dan pembayaran pajak/retribusi daerah, perluasan basis pajak baru, melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik/*tapping box*, secara bertahap memperbarui Zona Nilai Tanah (ZNT), melakukan kegiatan *cleansing data* dan pemuktahiran PBB serta pemberian kebijakan pemutihan denda PBB.

Langkah tersebut akan dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki administrasi dan pelayanan kepada masyarakat serta membantu meringankan beban masyarakat ditengah kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif. Disisi lain, Pemerintah Kota Tarakan juga berusaha memanfaatkan aset-aset Pemerintah Kota Tarakan yang strategis agar mempunyai *value* dengan menyewakan kepada investor-investor sehingga dapat meningkatkan PAD. Selain itu, mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keberlangsungan dunia usaha terutama UMKM yang banyak berkembang, daya beli masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Faktor eksternal lainnya seperti pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi yang juga berpotensi memengaruhi dinamika perekonomian Kota Tarakan ke depan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dan menjamin seluruh penerimaan daerah dapat diterima di kas daerah dan dicatat sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, maka dalam melaksanakan fungsi pengelolaan penerimaan daerah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketepatan.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan target Pendapatan Daerah dalam Kebijakan umum APBD Perubahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, diarahkan pada Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan potensi maupun *trend* realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Pemungutan dan penyeteroran pendapatan asli daerah diupayakan tidak

memberatkan para wajib pajak, baik masyarakat maupun dunia usaha serta tetap berada pada koridor peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Upaya-upaya dimaksud ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan serta penyetoran pajak dan retribusi daerah baik secara aplikasi *e-mobile* perbankan maupun lewat *e-commerce*, melakukan penyuluhan yang humanis dan berkelanjutan, pemuktahiran data wajib pajak yang aktif dan tidak aktif, pengendalian dan pengawasan yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dialokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Transfer Keuangan Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada APBD Perubahan 2025 dialokasikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 100.3.3.1/40/2025 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan Kurang Salur DBH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.89/2024 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Disisi lain, Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan dengan adanya Transfer Kurang Bayar

DBH Tahun 2023 yang ditransfer pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Pada alokasi Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdapat Penerimaan yang pada saat APBD murni belum teralokasi dan dilakukan Perubahan Perwali Penjabaran serta telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya dialokasikan pada rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/102/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/11/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara berupa Tunjangan Tambahan Ketua Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/334/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025.

Dari beberapa hal tersebut diatas dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari target awal sebesar **Rp. 257.819.877.204,-** menjadi **Rp. 257.670.067.284,10,-** atau turun sebesar **Rp. 149.809.919,90,-**
2. Pendapatan Dana Transfer mengalami kenaikan, semula sebesar **Rp. 895.175.351.000,-** menjadi **Rp. 917.157.149.084,-** atau mengalami kenaikan sebesar **Rp. 21.981.798.084,-** yang bersumber dari selisih target penerimaan transfer, baik dari APBN maupun APBD Provinsi, serta alokasi Bantuan Keuangan yang telah

dialokasikan pada saat Peraturan Walikota perubahan penjabaran APBD.

3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak mendapatkan alokasi Pendapatan sebagaimana yang diperoleh pada Anggaran Murni Tahun 2025.

Secara kumulatif kenaikan Pendapatan Daerah Kota Tarakan pada Perubahan Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 21.831.988.164,10** dari target APBD Murni Tahun 2025, dimana kenaikan tersebut bersumber dari 2 jenis Pendapatan daerah.

Hal lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Tarakan pada Perubahan Anggaran 2025 adalah dengan tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah serta hubungan antara pemerintah pusat dan provinsi dalam bentuk komunikasi terhadap potensi pendapatan transfer daerah.

Untuk belanja daerah, Pemerintah Kota Tarakan tetap berkomitmen terhadap sisa kewajiban pemerintah sebelumnya kepada pihak ketiga, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas publik serta belanja-belanja lainnya untuk menggerakkan kembali pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan.

Tabel A.1
Rencana Target Pendapatan Daerah APBD Perubahan 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
4	PENDAPATAN DAERAH	1.152.995.228.204,00	1.174.827.216.368,10	21.831.988.164,10
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	257.819.877.204,00	257.670.067.284,10	(149.809.919,90)
4.1.01	Pajak Daerah	144.635.000.000,00	135.128.400.000,00	(9.506.600.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	18.833.928.526,00	16.815.586.642,00	(2.018.341.884,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.203.957.872,00	31.501.958.687,10	15.298.000.815,10
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	78.146.990.806,00	74.224.121.955,00	(3.922.868.851,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	895.175.351.000,00	917.157.149.084,00	21.981.798.084,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	806.102.351.000,00	817.893.191.205,00	11.790.840.205,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	209.124.245.000,00	231.199.266.000,00	22.075.021.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	488.465.075.000,00	478.152.394.205,00	(10.312.680.795,00)
4.2.01.09	Dana Transfer Khusus	108.513.031.000,00	108.541.531.000,00	28.500.000,00
4.2.01.09.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	599.948.000,00	599.948.000,00	-
4.2.01.09.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	107.913.083.000,00	107.941.583.000,00	28.500.000,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	89.073.000.000,00	99.263.957.879,00	10.190.957.879,00

NO	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	65.820.000.000,00	88.370.825.707,00	22.550.825.707,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	23.253.000.000,00	10.893.132.172,00	(12.359.867.828,00)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik, belanja daerah diharapkan dapat berperan secara aktif sebagai instrumen fiskal daerah. Seperti saat ini, jumlah penduduk semakin bertambah tidak sebanding luas lahan pertanian yang semakin berkurang, ketegangan geopolitik yang terjadi antar negara, telah menimbulkan perang dan disrupti rantai pasok pangan yang menyebabkan harga-harga komoditas pokok dan energi melambung tinggi. Hal tersebut memberikan pengaruh dalam hal kemampuan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi global maupun nasional tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Tarakan.

Peran belanja daerah menjadi sangat krusial dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan belanja pada perubahan APBD. Sepanjang tahun 2025 belanja daerah mengalami penyesuaian dikarenakan pemerintah Kota Tarakan melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui pelaksanaan Inpres yang terdiri dari:

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
3. Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

4. Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
5. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, Pemerintah Kota Tarakan melakukan penyesuaian terhadap dana transfer pusat dengan adanya pengurangan DAU SG Pekerjaan Umum, tambahan DAK Non Fisik bagi Penyuluh Pertanian, Bantuan Keuangan dan alokasi Bantuan Keuangan Khusus TAPE sehingga Pemerintah Kota Tarakan tetap berkomitmen untuk mencapai target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan porsi belanja daerah yang telah disesuaikan dengan pendapatan daerah, pemanfaatan belanja daerah harus dilaksanakan se-optimal mungkin agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tarakan.

Pada perubahan anggaran tahun 2025, Pemerintah Kota Tarakan memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja daerah melalui penguatan belanja yang efektif. Disamping itu, Pemerintah Kota Tarakan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Kota Tarakan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Belanja daerah dalam hal ini dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dalam penyusunan anggaran perubahan tahun 2025, terdapat beberapa kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya, dan telah disampaikan pada saat perubahan Penjabaran APBD 2025 dan yang akan dilakukan pada saat perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2025, antara lain:

- Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
- Pemberian TPP THR dan Gaji 13 sebesar 75 % dari nilai TPP yang diterima pada Bulan sebelumnya sesuai dengan PP No 11 Tahun 2025.
- Penyesuaian atau Perbaikan Nomenklatur Belanja pada Kode Rekening sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- Pemenuhan Kebutuhan Wajib yang bersifat mengikat.

Untuk perubahan anggaran 2025 juga dilakukan beberapa hal kebijakan belanja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

dan wajib serta kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pemenuhan sebagian kewajiban Pemerintah kepada Pihak ketiga pada Tahun sebelumnya terdapat pada PPAS yang kami sampaikan.

Belanja Daerah pada **APBD 2025** sebesar **Rp.1.176.463.228.204,00**, pada anggaran **Perubahan APBD 2025** menjadi sebesar **Rp. 1.214.551.834.803,87** atau **naik senilai Rp.38.088.606.599,87** Penambahan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 bersumber dari Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Selanjutnya Rincian Belanja pada **Perubahan APBD Kota Tarakan Tahun 2025** dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan sosial

Dari beberapa komponen belanja operasi dapat kami sampaikan jumlah alokasi belanja operasi pada saat **perubahan APBD 2025** yang semula **Rp.1.026.891.989.074,11** menjadi **Rp 1.016.352.205.160,42** Jika dilihat dari Perubahan alokasi, terjadi Penurunan anggaran belanja, hal ini disebabkan adanya Penyesuaian Silpa BLUD/FKTP dari yang telah dianggarkan serta penyesuaian alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus dan Umum.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Belanja Modal sebesar **Rp.144.571.239.129,89** pada Perubahan tahun 2025 terdapat beberapa penambahan belanja seperti penambahan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi, serta Belanja Modal lainnya yang tersebar di beberapa OPD yang merupakan penunjang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga dalam menentukan kriteria belanja modal harus mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang terdapat dalam Perubahan Anggaran Tahun 2025 tidak mengalami perubahan sebesar **Rp.5.000.000.000,00**.

Tabel 5.2
Perkembangan Target Belanja Kota Tarakan

Kode	Uraian	Target Belanja (Rp)			Selisih
		APBD 2024	APBD 2025	2025 Perubahan	
5	BELANJA DAERAH	1,285,345,340,972 .00	1,176,463,228,204.00	1,214,551,834,803.87	38,088,606,599.87
5.1	Belanja Operasi	973,533,782,529.00	1,026,891,989,074.11	1,016,352,205,160.42	(10,539,783,913.69)
5.1.1	Belanja Pegawai	479,152,987,434.00	548,033,675,989.66	557,409,418,835.19	9,375,742,845.53
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339,230,850,709.00	371,873,175,263.60	341,819,331,789.58	(30,053,843,474.02)

Kode	Uraian	Target Belanja (Rp)			Selisih
		APBD 2024	APBD 2025	2025 Perubahan	
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	150,392,040,386.00	102,597,234,320.85	112,735,551,035.65	10,138,316,714.80
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,757,904,000.00	4,387,903,500.00	4,387,903,500.00	-
5.2	Belanja Modal	306,811,558,443.00	144,571,239,129.89	193,199,629,643.45	48,628,390,513.56
5.2.1	Belanja Tanah	4,673,392,640.00	3,665,000,000.00	10,495,000,000.00	6,830,000,000.00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39,757,444,895.00	33,843,370,324.00	37,581,449,467.52	3,738,079,143.52
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	55,769,518,978.00	18,451,104,935.26	36,629,479,368.23	18,178,374,432.97
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	194,725,513,147.00	80,542,537,656.63	100,000,807,442.70	19,458,269,786.07
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,751,701,450.00	3,603,493,800.00	3,563,543,800.00	(39,950,000.00)
5.2.6	Belanja Modal Aset lainnya	2,133,987,333.00	4,465,732,414.00	4,929,349,565.00	463,617,151.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
	SURPLUS/DEFISIT	(54,140,547,901.00)	(23,468,000,000.00)	(39,724,618,435.77)	(16,256,618,435.77)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan diantaranya :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Untuk alokasi pada penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD 2025 yang semula dialokasikan sebesar **Rp. 25.468.000.000,-** menjadi sebesar **Rp 51.001.337.910,77,-** dimana terdapat perubahan pada penerimaan pembiayaan berdasarkan hasil Audited BPK RI perwakilan Kalimantan Utara atas LKPD TA. 2024.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sektor pengeluaran pembiayaan yang tercantum pada perubahan APBD 2025 terdapat perubahan penyertaan modal menjadi **Rp. 11.276.719.475,-** dari yang sudah ditetapkan pada APBD Murni tahun 2025 sebesar **Rp.2.000.000.000,-**.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah APBD Perubahan 2025

Kode	Uraian	APBD 2024 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	APBD Perubahan 2025 (Rp)	Selisih
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	56,140,547,901.00	25,468,000,000.00	51,001,337,910.77	25,533,337,910.77
6.1.1	(SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	56,140,547,901.00	25,468,000,000.00	51,001,337,910.77	25,533,337,910.77)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.5	Penerima Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	2,000,000,000	11,276,719,475.00	9,276,719,475.00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	11,276,719,475.00	9,276,719,475.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang atau Bunga	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	54,140,547,901.00	23,468,000,000.00	39,724,618,435.77	16,256,618,435.77

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah Kota Tarakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah diperlukan strategi dalam pencapaian target tersebut. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, melalui:

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

- a. Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pendataan, pendaftaran, pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dengan mendekatkan tempat-tempat penyetoran pajak/retribusi ke masyarakat baik melalui aplikasi, bank maupun petugas pemungut, mengupayakan implementasi sistem pembayaran non tunai baik *QRIS*, *APMK* (alat pembayaran menggunakan kartu) maupun uang elektronik lainnya (*card based* dan *served based*)
- b. Melakukan kerjasama dengan *e-commerce* baik dari aplikasi Gojek maupun aplikasi Tokopedia dalam hal mempermudah warga dalam membayar pajak daerah.
- c. Meningkatkan sistem pengawasan pelaporan atas pembayaran pajak melalui teknologi Informasi (*Payment Control Sistem*).
- d. Meningkatkan pengawasan pengendalian serta penertiban secara terintegrasi terhadap seluruh perijinan usaha.
- e. Mendorong Bankaltimtara untuk memperluas jaringan pembayaran melalui bank-bank negara maupun bank swasta
- f. Mendorong Bankaltimtara untuk menjadi *Biller Agregator* pajak dan retribusi daerah.
- g. Mengupayakan relaksasi terhadap denda PBB-P2.
- h. Melakukan kegiatan *cleansing* dan pemuktahiran data objek pajak bumi dan bangunan terkait perubahan data maupun penghapusan piutang PBB.

- i. Mendorong transparansi transfer Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan melaksanakan rapat rekonsiliasi penerimaan opsen setiap bulan agar meminimalkan adanya kesalahan transfer
- j. Optimalisasi penerimaan opsen dengan melaksanakan kegiatan Razia Bersama kendaraan bermotor dan penagihan piutang PKB.
- k. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak
- l. Melakukan pemuktahiran data subjek dan objek pajak dan retribusi daerah
- m. mengupayakan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
- n. Mengintensifkan pemungutan pajak termasuk pemungutan piutang pajak, melalui kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kualitas SDM, dukungan teknologi dan prasarana lainnya serta sinergi kelembagaan dengan OPD.
- o. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif secara baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan.
- p. Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi) khususnya dari sektor retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang.
- q. Melakukan kerja sama dengan institusi mitra Pemerintah Kota Tarakan seperti BPK, BPKP, Kejaksaan Negeri Tarakan maupun KPP Pratama Kota Tarakan dalam upaya melakukan sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan maupun pengawasan terhadap Wajib Pajak yang disinyalir tidak memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- r. Mengoptimalkan nilai guna aset-aset daerah, khususnya tanah dan bangunan untuk diarahkan menjadi kontributor dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- s. Meningkatkan komunikasi dan kemitraan dengan para notaris guna menjangkau semaksimal mungkin pungutan BPHTB;
- t. Mendorong OPD-OPD pemungut retribusi agar lebih aktif dalam hal pemungutan retribusi daerah dan lebih protektif dalam hal pengawasan pemungutan retribusi daerah untuk mengurangi kebocoran-kebocoran atau pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- u. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif secara baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan;
- v. Komunikasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dalam peningkatan dana transfer termasuk Insentif Fiskal yang dialokasi setiap triwulan.
- w. Mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan rapat rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Provinsi minimal per semester setiap tahun agar Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi upaya peningkatan Pajak Daerah Provinsi.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah

Belanja Daerah diperlukan strategi dalam pencapaian target tersebut. Strategi pencapaian target Belanja Daerah, melalui:

1. Mengalokasikan belanja operasi yang meliputi pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya secara terukur, efektif dan efisien.
2. Penganggaran belanja barang dan jasa khususnya belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2025.

3. Mengalokasikan belanja modal yang diprioritaskan pada pembangunan dan pengembangan sarana prasarana terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhitungkan estimasi waktu pelaksanaan di sisa Tahun Anggaran 2025 dan visi misi Kepala Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman pelaksanaan APBD Perubahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD pada Pemerintahan Kota Tarakan serta seluruh komponen masyarakat di Kota Tarakan. Untuk itu, keduanya bersepakat untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan serta berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Tarakan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025.

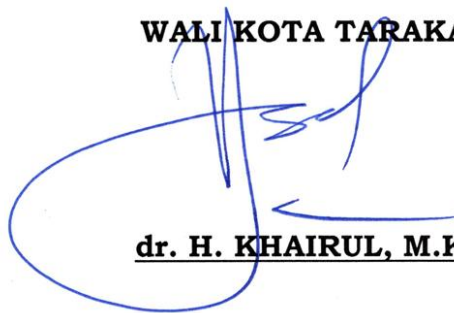
Tarakan, 24 Juli 2025

KETUA DPRD KOTA TARAkan



MUHAMMAD YUNUS, S.H

WALI KOTA TARAkan



dr. H. KHAIRUL, M.Kes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS Perubahan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah Rancangan Program Prioritas dan Pagu batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD. PPAS merupakan dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJP, RPJM, RKPD dan KUA. Perubahan PPAS merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu Tahun Anggaran yang disusun berdasarkan KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Tarakan Tahun 2025 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 496);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4)
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 4)
31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor .. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029;
33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 827);
34. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026;

35. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025;
36. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
37. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan target Pendapatan Daerah dalam Kebijakan umum APBD Perubahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, diarahkan pada Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan potensi maupun *trend* realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Pemungutan dan penyetoran pendapatan asli daerah diupayakan tidak memberatkan para wajib pajak, baik masyarakat maupun dunia usaha serta tetap berada pada koridor peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Upaya-upaya dimaksud ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan serta penyetoran pajak dan retribusi daerah baik secara aplikasi *e-mobile* perbankan maupun lewat *e-commerce*, melakukan penyuluhan yang humanis dan berkelanjutan, pemuktahiran data wajib pajak yang aktif dan tidak aktif, pengendalian dan pengawasan yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dialokasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Transfer Keuangan Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada APBD Perubahan 2025 dialokasikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 100.3.3.1/40/2025 tentang Alokasi Sementara Belanja

Bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan Kurang Salur DBH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.89/2024 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Disisi lain, Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan dengan adanya Kurang Bayar DBH Tahun 2023 yang ditransfer pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025.

Alokasi Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdapat Penerimaan yang pada saat APBD murni belum teralokasi dan dilakukan Perubahan Perwali Penjabaran serta telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya dialokasikan pada rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/102/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/11/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara berupa Tunjangan Tambahan Ketua Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/334/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025.

**Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025**

NO	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
4	PENDAPATAN DAERAH	1.152.995.228.204,00	1.174.827.216.368,10	21.831.988.164,10
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	257.819.877.204,00	257.670.067.284,10	(149.809.919,90)
4.1.01	Pajak Daerah	144.635.000.000,00	135.128.400.000,00	(9.506.600.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	18.833.928.526,00	16.815.586.642,00	(2.018.341.884,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.203.957.872,00	31.501.958.687,10	15.298.000.815,10
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	78.146.990.806,00	74.224.121.955,00	(3.922.868.851,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	895.175.351.000,00	917.157.149.084,00	21.981.798.084,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	806.102.351.000,00	817.893.191.205,00	11.790.840.205,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	209.124.245.000,00	231.199.266.000,00	22.075.021.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	488.465.075.000,00	478.152.394.205,00	(10.312.680.795,00)
4.2.01.09	Dana Transfer Khusus	108.513.031.000,00	108.541.531.000,00	28.500.000,00
4.2.01.09.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	599.948.000,00	599.948.000,00	-
4.2.01.09.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	107.913.083.000,00	107.941.583.000,00	28.500.000,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	89.073.000.000,00	99.263.957.879,00	10.190.957.879,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	65.820.000.000,00	88.370.825.707,00	22.550.825.707,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	23.253.000.000,00	10.893.132.172,00	(12.359.867.828,00)

Untuk itu beberapa kebijakan bidang pendapatan yang telah ditetapkan dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2025 tetap terus dilaksanakan dengan beberapa revisi guna menyesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi. Beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan di sisa tahun anggaran 2025 dalam rangka pencapaian target pendapatan antara lain:

- a. Meningkatkan sistem pengawasan pelaporan atas pembayaran pajak melalui teknologi Informasi (*Payment Control Sistem*).
- b. Meningkatkan pengawasan pengendalian serta penertiban secara terintegrasi terhadap seluruh perijinan usaha.
- c. Melakukan intensifikasi pemungutan serta ekstensifikasi objek-objek pajak dengan cara pendataan OP/WP baru yang belum terdata.
- d. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap unit-unit usaha Perusda yang menghasilkan PAD, khususnya terhadap perjanjian kerja sama yang telah berakhir basa berlakunya.
- e. Melakukan Penerapan sangsi yang tegas terhadap wajib Pajak dan restribusi yang melanggar Perda.
- f. Meningkatkan pengawasan DPRD secara berkala melalui *public hearing* terhadap SKPD yang realisasi penerimaannya tidak mencapai target.
- g. Penghapusan Piutang pajak yang sudah Kadaluarsa.
- h. Komunikasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dalam peningkatan dana transfer termasuk Insentif Fiskal yang dialokasi setiap triwulan.
- i. Mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan rapat rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Provinsi minimal per semester setiap tahun agar Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi upaya peningkatan Pajak Daerah Provinsi.
- j. Mendorong transparansi transfer Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan melaksanakan rapat rekonsialiasi penerimaan opsen setiap bulan agar meminimalkan adanya kesalahan transfer.
- k. Optimalisasi penerimaan opsen dengan melaksanakan kegiatan Razia Bersama kendaraan bermotor dan penagihan piutang PKB

Meskipun intensifikasi dan ekstensifikasi terus diupayakan, namun prinsip pemungutan tetap tidak memberatkan masyarakat/dunia usaha. Upaya tersebut ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkat penyuluhan, akurasi data, penghapusan terhadap piutang pajak kadaluwarsa, pengendalian dan pengawasan yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan serta optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Tarakan sehingga memberikan kontribusi terhadap PAD.

Penetapan target Pendapatan Daerah dalam Kebijakan umum APBD Perubahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, diarahkan pada Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Tarakan pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Tarakan dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2025 yang mengambil tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Berdasarkan RKP Tahun 2025 dan KEM PPKF TA 2025, pemerintah Kota Tarakan melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui pelaksanaan Inpres yang terdiri dari:

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
3. Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.
4. Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
5. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Prioritas Belanja Pemerintah Kota Tarakan yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025 memuat:

1. Sinergitas dan Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Pada Tabel 3.1;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Pada Tabel 3.2; dan
3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Pada Tabel 3.3

Adapun sinergitas program dimaksud sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.1
**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PP 10	Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada Semua Tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan serta Tenaga Honorer di Daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.	Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
					Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	DPRKPP
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DPRKPP
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	DPRKPP
					Program Penatagunaan Tanah	DPRKPP
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SEMUA OPD
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	BAPPEDA LITBANG

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
					Pembangunan Daerah	
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	DKISP
					Program Aplikasi Informatika	DKSIP
					Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
					Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
					Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
					Program Pengelolaan Informasi Adminidtrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DISDUKCAPIL
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DKISP
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	DKISP
					Program Pengelolaan Arsip	DISPUSPAN
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DISPUSPAN
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	DISPUSPAN
					Program Pemerintahan	SETDA

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
					dan Kesejahteraan Rakyat	
					Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SETWAN
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CTG
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	SEMUA KECAMATAN
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
					Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	PP 6	Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di Setiap Kabupaten/Kota.	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
					Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
					Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
					Program Pemasaran Pariwisata	DISBUDPORAPAR
					Program Penyediaan dan Pengembangan	DKPP

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
					Sarana Pertanian	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
					Program Perizinan Usaha Pertanian	DKPP
					Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DKUKMP
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DKUKMP
					Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	DKUKMP
					Program Pengembangan Ekspor	DKUKMP
					Program standarisasi dan perlindungan konsumen	DKUKMP
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISBUDPORAPAR
					Program Perencanaan Dan Pembangunan	DPTK

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
					Industri	
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DPTK
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DPTK
					Program Perekonomian dan Pembangunan (Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian)	SETDA
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISBUDPORAPAR
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	DISBUDPORAPAR
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DISBUDPORAPAR
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISBUDPORAPAR
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	PP 2	Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)	Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
	Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
					Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		PP 5	Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota	Sasaran 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	DPRKPP
					Program Pengelolaan	DINSOSPM

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
					Taman Makam Pahlawan	
					Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
					Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
					Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	DPUPR
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	DPUPR
					Program Perekonomian Dan Pembangunan (Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam)	SETDA
		PP 8	Pengadaan Balai	Sasaran 4 :	Program	DPTK

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Perencanaan Tenaga Kerja	
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPTK
					Program Penempatan Tenaga Kerja	DPTK
					Program Hubungan Industrial	DPTK
		PP 9	Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota	Sasaran 4 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DKUKMP
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DKUKMP
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	DKUKMP
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DKUKMP
					Program Pengembangan UMKM	DKUKMP
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.	PP 7	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Belajar 16 Tahun yang Berwawasan	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
					Program Pengembangan Kurikulum	DISDIK
					Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	DISDIK
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	DISDIK
					Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	DISDIK
					Program Pembinaan	DISPUSPAN

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
					Perpustakaan	
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPPAPPKB
					Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPAPPKB
					Program Pengendalian Penduduk	DPPPAPPKB
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB
					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
					Program Perlindungan Perempuan	DPPPAPPKB
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPAPPKB
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DINSOSPM
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINSOSPM
					Program Pengembangan Kebudayaan	DISBUDPORAPAR
					Program Pengembangan	DISBUDPORAPAR

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
					Kesenian Tradisional	
					Program Pembinaan Sejarah	DISBUDPORAPAR
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISBUDPORAPAR
					Program Pengelolaan Permuseuman	DISBUDPORAPAR
					Program Pelestarian Koleksi Nasioal dan Naskah Kuno	DISPUSPAN
				Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Masyarakat	DINKES
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	DINKES
				PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PP 3
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP					
Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	DISKAN
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DISKAN
PN 6	Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP 4	Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di Setiap Kabupaten/Kota	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pengembangan Perumahan	DPRKPP
					Program Kawasan Permukiman	DPRKPP
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKPP
					Program Pemberdayaan Sosial	DINSOSPM
					Program Rehabilitasi Sosial	DINSOSPM
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOSPM
					Program Penanganan Bencana	DINSOSPM
				Sasaran 7 Meningkatnya Ketahanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	SATPOLPP & PMK

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
					Penyelamatan Non Kebakaran	
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BAKESBANGPOL
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	SEMUA KECAMATAN
					Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOLPP & PMK
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	SEMUA KECAMATAN
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BAKESBANGPOL
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BAKESBANGPOL
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	BAKESBANGPOL
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi		Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan					
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur					

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
PP 1	Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan	-	-	-
PP 2	Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)	Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran	DLH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
			Program Penanganan Pengaduan	DLH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Persampahan	DLH
PP 3	Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	DISKAN

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DISKAN
PP 4	Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di Setiap Kabupaten/Kota	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pengembangan Perumahan	DPRKPP
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPP
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKPP
			Program Pemberdayaan Sosial	DINSOSPM
			Program Rehabilitasi Sosial	DINSOSPM
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOSPM
			Program Penanganan Bencana	DINSOSPM
		Sasaran 7 Meningkatnya Ketahanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOLPP & PMK
			Program Penguatan Ideologi Pancasila	BAKESBANGPOL

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			dan Karakter Kebangsaan	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	SEMUA KECAMATAN
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOLPP & PMK
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	SEMUA KECAMATAN
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BAKESBANGPOL
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BAKESBANGPOL
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	BAKESBANGPOL

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
PP 5	Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota	Sasaran 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	DPRKPP
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOSPM
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
			Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	DPUPR
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	DPUPR
			Program Perekonomian Dan Pembangunan (Pemantauan	SETDA

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Kebijakan Sumber Daya Alam)	
PP 6	Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di Setiap Kabupaten/Kota.	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pemasaran Pariwisata	DISBUDPORAPAR
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
			Program Perizinan Usaha Pertanian	DKPP
			Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DKUKMP
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DKUKMP
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	DKUKMP
			Program Pengembangan Ekspor	DKUKMP
			Program standarisasi dan perlindungan konsumen	DKUKMP
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISBUDPORAPAR
			Program Perencanaan Dan Pembangunan	DPTK

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DPTK
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DPTK
			Program Perekonomian dan Pembangunan (Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian)	SETDA
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISBUDPORAPAR
PP 7	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Belajar	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
	16 Tahun yang Berwawasan	Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Program Pengembangan Kurikulum	DISDIK
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIK
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	DISDIK
			Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	DISDIK
			Program Pembinaan Perpustakaan	DISPUSPAN
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPPAPPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPAPPKB
			Program Pengendalian Penduduk	DPPPAPPKB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Perlindungan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPAPPKB
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DINSOSPM
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINSOSPM
			Program Pengembangan Kebudayaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISBUDPORAPAR
			Program Pembinaan Sejarah	DISBUDPORAPAR
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISBUDPORAPAR
			Program Pengelolaan	DISBUDPORAPAR

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Permuseuman	
			Program Pelestarian Koleksi Nasioal dan Naskah Kuno	DISPUSPAN
		Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Masyarakat	DINKES
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	DINKES
PP 8	Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial.	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DPTK
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPTK
			Program Penempatan Tenaga Kerja	DPTK
			Program Hubungan Industrial	DPTK

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
PP 9	Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DKUKMP
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DKUKMP
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	DKUKMP
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DKUKMP
			Program Pengembangan UMKM	DKUKMP
PP 10	Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada Semua Tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan serta Tenaga Honorer di Daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.	Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
			Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	DPRKPP
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DPRKPP
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan	DPRKPP

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Tanah Untuk Pembangunan	
			Program Penatagunaan Tanah	DPRKPP
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SEMUA OPD
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG
			Program Informasi dan Komunikasi	DKISP

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Publik	
			Program Aplikasi Informatika	DKSIP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Informasi Adminidtrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	DKISP
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	DKISP
			Program Pengelolaan Arsip	DISPUSPAN
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DISPUSPAN
			Program Perizinan Penggunaan	DISPUSPAN

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Arsip	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
			Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SETWAN
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CTG
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	SEMUA KECAMATAN
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
1.	Prioritas I : Program yang berkaitan dengan pelayanan wajib dasar di tambahkan dengan program penunjang	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
			Program Pengembangan Kurikulum	DISDIK
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIK
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	DISDIK
			Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	DISDIK
			Program Pembinaan Perpustakaan	DISPUSPAN
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPPAPPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPAPPKB
			Program Pengendalian Penduduk	DPPPAPPKB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Perlindungan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPAPPKB
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DINSOSPM
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINSOSPM
			Program Pengembangan Kebudayaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISBUDPORAPAR
			Program Pembinaan Sejarah	DISBUDPORAPAR
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISBUDPORAPAR
			Program Pengelolaan Permuseuman	DISBUDPORAPAR
			Program Pelestarian Koleksi Nasioal dan Naskah Kuno	DISPUSPAN
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	DINKES

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Perorangan Masyarakat	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	DINKES
		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang merata	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	DPRKPP
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOSPM
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
			Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	DPUPR
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	DPUPR
			Program Perekonomian Dan Pembangunan (Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam)	SETDA
2.	Prioritas II : program yang secara langsung mendukung sasaran pembangunan sebagaimana pada tujuan sasaran RPD	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pemasaran Pariwisata	DISBUDPORAPAR
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DISBUDPORAPAR
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISBUDPORAPAR
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Perizinan Usaha Pertanian	DKPP
			Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DKUKMP
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DKUKMP
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	DKUKMP
			Program Pengembangan Ekspor	DKUKMP
			Program standarisasi dan perlindungan konsumen	DKUKMP
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DKUKMP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DKUKMP
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	DKUKMP
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DKUKMP
			Program Pengembangan UMKM	DKUKMP
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DPTK
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DPTK
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DPTK
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	DPTK
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPTK
			Program Penempatan Tenaga Kerja	DPTK
			Program Hubungan Industrial	DPTK
			Program Perekonomian dan Pembangunan (Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian)	SETDA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	DISKAN
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DISKAN
			Program Pengembangan Perumahan	DPRKPP
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPP
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKPP
			Program Pemberdayaan Sosial	DINSOSPM
			Program Rehabilitasi Sosial	DINSOSPM
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOSPM
			Program Penanganan Bencana	DINSOSPM
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKPAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKPAD
			Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	DPRKPP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DPRKPP
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	DPRKPP
			Program Penatagunaan Tanah	DPRKPP
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SEMUA OPD
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	DKISP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Aplikasi Informatika	DKSIP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Informasi Adminidtrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	DKISP
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	DKISP
			Program Pengelolaan Arsip	DISPUSPAN
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DISPUSPAN
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DLH
3.	Prioritas III : program penyelenggaraan urusan sesuai urusan yang belum terakomodir pada prioritas I dan II	Meningkatnya Ketahanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOLPP & PMK

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BAKESBANGPOL
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	SEMUA KECAMATAN
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOLPP & PMK
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	SEMUA KECAMATAN
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BAKESBANGPOL
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BAKESBANGPOL
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	BAKESBANGPOL
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan	SETDA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	OPD Pelaksana
			Rakyat	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urPusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan perubahan anggaran tahun 2025, Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD Perubahan tahun anggaran 2025. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD Perubahan tahun anggaran 2025. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara interaktif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 perubahan yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS Perubahan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA Perubahan dan PPAS Perubahan berdasarkan RKPD Perubahan dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut sebagaimana Lampiran dibawah ini.

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
					Dinas Pendidikan	307.648.507.274	292.122.961.194	(15.525.546.080)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	205.813.144.677	212.896.847.840	7.083.703.163
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.248.521.385	2.082.416.885	(23.166.104.500)
1	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
1	01	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	26.480.000	22.508.000	(3.972.000)
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.279.925	4.491.932	(787.993)
1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.983.600	2.491.800	(2.491.800)
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.972.500	6.785.250	(1.187.250)
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.979.600	5.979.600	-
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	89.538.880	(10.461.120)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.986.440	79.986.440	-
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	13.500.000	(1.500.000)
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	23.500.000	13.500.000
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.396.600	123.048.200	43.651.600
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.606.000	72.606.000	-
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	-
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.338.249	298.338.249	-
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.426.500	7.500.000	(60.926.500)
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.000.000	375.000.000	-
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000	120.000.000	-
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.890.000	24.890.000	-
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	80.149.400	67.360.000	(12.789.400)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	19.564.400	26.486.000	6.921.600
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	39.885.050	33.847.545	(6.037.505)
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.252.544.000	34.252.544.000	-
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.990.000	4.006.500	(983.500)
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	19.841.200	10.004.800	(9.836.400)
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	34.988.800	21.841.400	(13.147.400)
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	10.000.000	8.500.000	(1.500.000)
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.171.400	16.440.000	(12.731.400)
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	9.994.500	8.857.000	(1.137.500)
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.960.000	8.699.000	(1.261.000)
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	29.962.400	17.052.000	(12.910.400)
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	19.950.000	19.950.000	-
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	40.000.000	40.000.000	-
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.136.154.000	1.106.023.800	(30.130.200)
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000	150.000.000	-
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	19.980.000	15.834.000	(4.146.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	38.501.000	25.905.500	(12.595.500)
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	400.000.000	900.000.000	500.000.000
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.008.550.000	2.008.550.000	-
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	100.000.000	100.000.000	-
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	300.000.000	730.000.000	430.000.000
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100.000.000	82.301.500	(17.698.500)
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.427.178.900	1.404.153.450	(23.025.450)
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	315.266.800	248.357.300	(66.909.500)
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	49.980.000	40.653.000	(9.327.000)
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	29.650.400	17.741.200	(11.909.200)
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20.006.052.200	19.935.470.600	(70.581.600)
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.000.000	3.780.000	(1.220.000)
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.949.600	18.634.800	(11.314.800)
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20.000.000	15.809.000	(4.191.000)
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	34.994.700	26.757.100	(8.237.600)
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.927.200	18.761.100	(11.166.100)
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	9.980.000	8.230.000	(1.750.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.000.000	7.700.000	(2.300.000)
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	14.987.500	12.287.500	(2.700.000)
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	29.919.400	29.919.400	-
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	14.989.600	10.814.800	(4.174.800)
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	20.000.000	20.000.000	-
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	232.000.000	232.000.000	-
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.171.932.000	7.244.181.600	72.249.600
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	24.779.000	8.345.000	(16.434.000)
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.994.800	21.607.400	(8.387.400)
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.622.400	17.321.400	(12.301.000)
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	74.992.800	60.421.400	(14.571.400)
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	29.835.600	20.291.350	(9.544.250)
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24.974.200	18.868.600	(6.105.600)
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	546.016.000	546.016.000	-
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	29.625.200	23.233.100	(6.392.100)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.820.000	25.020.000	(4.800.000)
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000	100.000.000	-
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	599.948.000	599.948.000	-
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	84.998.250	83.256.025	(1.742.225)
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	34.904.900	31.711.350	(3.193.550)
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.823.419.998	4.745.419.998	(78.000.000)
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	39.982.200	27.436.300	(12.545.900)
1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	19.986.300	15.988.950	(3.997.350)
1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	19.999.500	16.551.450	(3.448.050)
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.982.800	22.512.200	(7.470.600)
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49.989.000	43.189.000	(6.800.000)
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	30.000.000	29.658.000	(342.000)
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	94.636.400	69.867.200	(24.769.200)
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	315.815.500	165.815.500
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	42.600.000	(7.400.000)
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	01	06	2.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	35.000.000	35.000.000	-
					Dinas Kesehatan	72.495.803.540	73.354.233.405	858.429.865
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.600	1.199.640	(799.960)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.700.000	(300.000)
1	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	4.240.000	(760.000)
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.905.070.763	35.459.704.701	554.633.938
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.589.554.980	3.177.796.137	(411.758.843)
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.980.900	19.980.900	-
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.221.050	136.913.680	(16.307.370)
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.421.500	93.610.450	61.188.950
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.970.000	5.070.000	(900.000)
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.070.200	43.615.400	(43.454.800)
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	537.138.000	534.538.000	(2.600.000)
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	267.264.400	267.264.400	-
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	-
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	610.000.000	610.000.000	-
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	677.400.000	677.400.000	-
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.120.000	29.520.000	(153.600.000)
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	302.544.350	2.544.350
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.537.500	56.746.400	(2.791.100)
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	575.000.000	575.000.000	-
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.500.000	50.500.000	-
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	34.250.000	34.250.000	-
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.430.181.860	1.430.181.860	-
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	512.000.000	512.000.000	-
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.681.756.000	4.681.756.000	-
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	104.045.000	37.545.000	(66.500.000)
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	35.614.320	35.614.320	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93.695.332	81.895.332	(11.800.000)
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	71.251.200	56.014.400	(15.236.800)
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.200.000	100.200.000	-
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	163.049.600	110.399.600	(52.650.000)
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	156.000.000	156.000.000	-
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	159.908.790	141.736.290	(18.172.500)
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	112.493.650	112.493.650	-
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60.871.638	38.772.138	(22.099.500)
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	50.000.000	-
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	49.989.080	33.189.080	(16.800.000)
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35.500.000	35.500.000	-
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	111.342.750	106.542.750	(4.800.000)
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	75.000.000	45.000.000	(30.000.000)
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.208.800	46.408.800	(1.800.000)
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	49.754.000	46.634.000	(3.120.000)
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100.000.000	98.800.000	(1.200.000)
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	224.690.000	209.690.000	(15.000.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	153.998.200	134.465.400	(19.532.800)
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	36.995.000	36.995.000	-
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	685.106.800	753.173.200	68.066.400
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.971.606.799	15.727.606.799	756.000.000
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	74.872.200	71.497.200	(3.375.000)
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	157.551.600	157.551.600	-
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	19.476.940	19.476.940	-
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	556.995.580	556.995.580	-
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	174.221.400	159.533.000	(14.688.400)
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	34.982.800	15.500.000	(19.482.800)
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	45.000.000	45.000.000	-
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	50.000.000	48.600.450	(1.399.550)
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	32.909.400	27.498.200	(5.411.200)
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	31.495.000	31.495.000	-
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	550.860.000	550.860.000	-
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	147.551.700	62.412.200	(85.139.500)
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	286.877.308	286.877.308	-
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	105.403.000	48.560.000	(56.843.000)
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	159.365.000	157.685.000	(1.680.000)
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.240.181.300	1.220.454.050	(19.727.250)
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	99.045.400	85.032.000	(14.013.400)
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	205.561.200	205.561.200	-
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	110.997.000	110.997.000	-
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.861.060.000	2.440.800.000	579.740.000
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	81.000.000	63.000.000	(18.000.000)
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	90.639.000	78.639.000	(12.000.000)
					Puskesmas Karang Rejo	7.934.433.899	8.069.970.117	135.536.218

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.264.600.000	7.400.136.218	135.536.218
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.000.000	42.000.000	-
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.200.000	23.200.000	-
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.000.000	9.000.000	-
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.850.000	2.850.000	-
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	318.110.000	318.110.000	-
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.800.000	4.800.000	-
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.800.000	13.800.000	-
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.515.000	27.515.000	-
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000	2.000.000	-
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38.150.000	38.150.000	-
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	120.428.899	120.428.899	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.860.000	10.860.000	-
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000	100.000	-
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.200.000	5.200.000	-
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000	1.000.000	-
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	27.000.000	27.000.000	-
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	9.700.000	9.700.000	-
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.120.000	14.120.000	-
					Puskesmas Juara	3.296.682.054	3.437.790.846	141.108.792
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.606.000.000	2.747.108.792	141.108.792
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.240.000	42.240.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.800.000	39.800.000	-
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.000.000	27.000.000	-
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.500.000	10.500.000	-
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	258.940.000	258.940.000	-
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.000.000	2.000.000	-
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.400.000	7.400.000	-
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.425.000	22.425.000	-
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.400.000	6.400.000	-
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	53.830.000	53.830.000	-
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	140.672.054	140.672.054	-
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.860.000	4.860.000	-
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.000.000	1.000.000	-
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.440.000	11.440.000	-
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000	600.000	-
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	16.500.000	16.500.000	-
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	17.100.000	17.100.000	-
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27.975.000	27.975.000	-
					Puskesmas Sebengkok	3.059.158.900	3.335.547.988	276.389.088
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.001.000.000	2.277.389.088	276.389.088
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	221.400.000	221.400.000	-
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.000.000	54.000.000	-
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.000.000	36.000.000	-
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.905.000	14.905.000	-
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	314.978.000	314.978.000	-
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.400.000	2.400.000	-
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	37.090.000	37.090.000	-
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.960.000	34.960.000	-
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	4.000.000	4.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
					Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	108.615.000	108.615.000	-
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	144.870.900	144.870.900	-
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.900.000	7.900.000	-
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	250.000	250.000	-
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.750.000	6.750.000	-
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	300.000	300.000	-
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	14.400.000	14.400.000	-
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	37.740.000	37.740.000	-
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.600.000	17.600.000	-
					Puskesmas Pantai Amal	1.160.883.249	1.434.994.869	274.111.620
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	641.672.000	915.783.620	274.111.620

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.000.000	54.000.000	-
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.600.000	12.600.000	-
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.800.000	10.800.000	-
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000	12.000.000	-
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	263.450.000	263.450.000	-
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.000.000	3.000.000	-
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.400.000	9.400.000	-
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.350.000	12.350.000	-
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.000.000	4.000.000	-
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	27.960.000	27.960.000	-
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	70.261.249	70.261.249	-
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	750.000	750.000	-
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.140.000	4.140.000	-
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000	2.000.000	-
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	5.400.000	5.400.000	-
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	19.400.000	19.400.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.700.000	7.700.000	-
					Puskesmas Gunung Lingkas	2.856.219.898	3.562.541.741	706.321.843
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.280.000.000	2.986.321.843	706.321.843
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.000.000	48.000.000	-
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.000.000	42.000.000	-
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.000.000	24.000.000	-
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.600.000	6.600.000	-
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.491.000	230.491.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.000.000	4.000.000	-
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000	11.000.000	-
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.100.000	12.100.000	-
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000	6.000.000	-
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29.143.500	29.143.500	-
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	91.485.398	91.485.398	-
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.000.000	9.000.000	-
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000	200.000	-
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.400.000	1.400.000	-
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.800.000	2.800.000	-
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	20.000.000	20.000.000	-
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	13.500.000	13.500.000	-
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.500.000	24.500.000	-
					Puskesmas Mamburungan	3.717.300.000	2.708.337.573	(1.008.962.427)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.100.600.000	2.091.637.573	(1.008.962.427)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.480.000	51.480.000	-
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.000.000	32.000.000	-
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000	6.000.000	-
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.300.000	2.300.000	-
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	253.146.000	253.146.000	-
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.000.000	4.000.000	-
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.400.000	9.400.000	-
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.600.000	14.600.000	-
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.400.000	8.400.000	-
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39.665.000	39.665.000	-
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	113.399.000	113.399.000	-
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.970.000	5.970.000	-
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	800.000	800.000	-
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.840.000	7.840.000	-
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	5.100.000	5.100.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	24.000.000	24.000.000	-
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	22.400.000	22.400.000	-
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.200.000	16.200.000	-
					Laboratorium Kesehatan Daerah	950.000.000	1.723.966.505	773.966.505
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	950.000.000	1.723.966.505	773.966.505
					Dinas Kesehatan/RSU Kota Tarakan	84.284.224.457	73.736.386.550	(10.547.837.907)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.700.000	(300.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.092.846.457	13.005.129.558	(87.716.899)
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.989.378.000	6.281.636.000	292.258.000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	61.000.000.000	49.622.920.992	(11.377.079.008)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.750.000.000	4.375.000.000	625.000.000
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	450.000.000	450.000.000	-
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	133.274.935.294	171.112.076.772	37.837.141.478
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	400.000	(1.600.000)
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	400.000	(1.600.000)
1	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.721.613.969	9.837.178.989	115.565.020
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	886.199.274	724.233.786	(161.965.488)
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	199.843.120	96.047.520	(103.795.600)
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.986.200	4.986.200	-
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.926.350	95.858.600	(16.067.750)
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.000.000	31.010.000	(990.000)
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	1.000.000	(5.000.000)
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.175.720	40.168.800	(60.006.920)
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	1.400.000.000	1.400.000.000	-
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	63.224.500	63.224.500	-
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.999.560	99.999.560	-
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.956.154	170.237.054	(14.719.100)
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.950.000	199.950.000	-
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.236.510	5.112.000	(69.124.510)
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	745.895.818	745.895.818	-
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.696.600	74.696.600	-
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407.097.000	407.097.000	-
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.907.400	42.907.400	-
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	750.000.000	750.000.000	-
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	300.000.000	300.000.000	-
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	300.000.000	400.000.000	100.000.000
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	499.986.432	499.986.432	-
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.000.000	277.608.400	(22.391.600)
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	1.800.000.000	4.020.000.000	2.220.000.000
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	150.000.000	350.000.000	200.000.000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	599.999.800	599.999.800	-
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000	-	(100.000.000)
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	03	06	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	18.332.000.000	18.332.000.000	-
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	10.400.000.000	10.872.380.000	472.380.000
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	13.481.806.781	24.947.658.572	11.465.851.790
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	750.000.000	750.000.000	-
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	600.000.000	-
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.696.900.000	20.918.657.470	13.221.757.470
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	669.984.200	637.582.800	(32.401.400)
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	173.441.400	130.801.200	(42.640.200)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	999.590.000	5.406.570.600	4.406.980.600
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000.000	3.200.000.000	1.600.000.000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	400.000.000	400.000.000	-
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	2.999.999.196	2.999.999.196	-
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	35.173.346.850	35.173.346.832	(17)
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	11.254.796.000	14.859.795.944	3.604.999.944
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	370.000.000	782.000.005	412.000.005
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	269.839.000	269.839.000	-
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.050.000.000	4.689.989.534	639.989.534
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	199.975.770	160.965.770	(39.010.000)
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	149.310.050	138.318.250	(10.991.800)
1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	49.892.840	49.812.840	(80.000)
1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	50.000.000	50.000.000	-
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	49.914.500	49.914.500	-
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	49.999.700	46.062.200	(3.937.500)
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	50.000.000	50.000.000	-
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	49.980.800	49.980.800	-
1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	50.000.000	50.000.000	-
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	275.000.000	275.000.000	-
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	175.000.000	175.000.000	-
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	-
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	74.999.600	71.055.600	(3.944.000)
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	99.964.200	121.847.200	21.883.000
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	250.000.000	250.000.000	-
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50.000.000	100.000.000	50.000.000
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	62.500.000	62.500.000	-
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	47.495.376.217	56.931.199.069	9.435.822.852
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.707.000	(293.000)
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.740.000	(260.000)
1	04	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	4.240.000	(760.000)
1	04	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	44.975.880	44.975.880	-
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.781.276.014	5.807.974.239	26.698.225
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.607.086.000	1.541.036.000	(66.050.000)
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.984.200	3.984.200	-
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.431.500	37.921.380	(5.510.120)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.191.400	6.472.040	(719.360)
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	-
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.368.200	89.257.600	13.889.400
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	54.535.130	54.535.130	-
1	04	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.712.200	96.103.800	(8.608.400)
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	-
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000	240.000.000	-
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.989.000	9.989.500	(1.999.500)
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.560.000	3.450.000	(59.110.000)
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.898.340	52.898.340	-
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	276.639.800	276.509.800	(130.000)
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.910.000	20.910.000	-
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	49.999.700	49.079.000	(920.700)
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	49.999.800	49.069.000	(930.800)
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	199.999.900	191.110.200	(8.889.700)
1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19.477.600	11.809.900	(7.667.700)
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	50.000.000	47.600.000	(2.400.000)
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisi-asi Kebijakan Bidang PKP	244.984.300	181.951.200	(63.033.100)
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	4.964.800	4.173.600	(791.200)
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	43.009.600	23.631.500	(19.378.100)
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1.100.250.020	1.199.382.260	99.132.240

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.123.079.600	2.100.715.400	(22.364.200)
1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	15.998.500	14.038.100	(1.960.400)
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	31.864.559.358	37.603.289.160	5.738.729.802
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	24.991.400	19.346.600	(5.644.800)
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	742.688.095	1.174.265.600	431.577.505
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	19.994.900	14.854.100	(5.140.800)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.985.600	16.972.200	(3.013.400)
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.998.800	6.820.000	(3.178.800)
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	05	2.01	0003	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.995.700	25.299.200	(25.696.500)
2	10	05	2.01	0004	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2	10	05	2.01	0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.406.041.840	4.864.487.620	3.458.445.780
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	33.249.040	16.545.520	(16.703.520)
2	10	10	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.550.000	15.054.000	(1.496.000)
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21.111.404.596	21.305.974.859	194.570.263

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	05	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.500.000	(500.000)
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.500.000	(500.000)
1	05	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah	5.000.000	4.000.000	(1.000.000)
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.777.066.916	16.699.989.579	2.922.922.663
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.116.000	73.116.000	-
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	213.329.250	213.329.250	-
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.989.800	4.989.800	-
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.421.600	93.421.600	44.000.000
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.998.440	48.343.260	(1.655.180)
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.700	18.612.200	(1.387.500)
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317.379.200	158.883.050	(158.496.150)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.340.000	36.670.000	(36.670.000)
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.280.500	135.280.500	-
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.178.066.000	2.691.076.000	(2.486.990.000)
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.560.000	16.570.000	(66.990.000)
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.062.500	400.062.500	-
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.972.000	14.972.000	-
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	49.999.500	49.999.500	-
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	49.950.100	49.950.100	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	49.981.190	49.981.190	-
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	49.990.000	49.990.000	-
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	-
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	85.000.000	85.000.000	-
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	49.991.300	49.991.300	-
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.976.890	31.813.320	(18.163.570)
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	-
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	49.980.000	49.980.000	-
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	24.981.660	24.981.660	-
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25.000.000	25.000.000	-
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	24.992.050	24.992.050	-
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	24.990.000	24.990.000	-
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	25.000.000	25.000.000	-
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	24.990.000	24.990.000	-
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	25.000.000	25.000.000	-
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.283.328.750	7.163.365.752	880.037.002
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.260.000	(240.000)
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	840.000	(160.000)
1	05	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	2.120.000	(380.000)
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.564.874.805	3.766.049.737	201.174.932
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	593.802.000	461.802.000	(132.000.000)
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	109.167.550	109.167.550	-
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.550	9.999.550	-
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.999.400	21.999.400	-
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.155.490	35.081.280	8.925.790
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.720	13.499.720	(1.500.000)
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	5.280.000	(720.000)
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.854.420	53.509.000	(21.345.420)
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	19.296.000	19.296.000	-
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	99.770.300	84.530.300	(15.240.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.800.000	135.800.000	-
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.560.000	40.573.200	(24.986.800)
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	250.000.000	-
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.963.450	4.963.450	-
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.630.000	46.630.000	-
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	79.999.500	555.230.000	475.230.500
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	91.336.300	86.843.800	(4.492.500)
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	73.459.475	61.351.575	(12.107.900)
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	49.824.150	49.824.150	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	49.999.900	47.350.400	(2.649.500)
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	75.000.000	75.000.000	-
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	115.784.800	(34.215.200)
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	49.999.800	45.562.800	(4.437.000)
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	18.900.000	18.900.000	-
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	91.336.300	77.735.400	(13.600.900)
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	47.119.500	(2.880.500)
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	500.000	420.000	(80.000)
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.000.000	1.700.000	(300.000)
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4.610.830	170.810.830	166.200.000
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	419.990.110	722.428.110	302.438.000
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	500.000	420.000	(80.000)
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	5.000.000	4.240.000	(760.000)
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	19.999.700	18.243.200	(1.756.500)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7.600.756.328	8.227.475.769	626.719.441
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.980.000	1.680.000	(300.000)
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.980.000	1.680.000	(300.000)
1	06	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.980.000	4.200.000	(780.000)
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.087.188.496	3.935.953.212	848.764.716
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.056.000	62.056.000	-
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.125.000	-	(18.125.000)
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.978.700	4.978.700	-
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.340.280	66.324.380	(6.015.900)
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.750.640	21.275.700	(2.474.940)
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	5.100.000	(900.000)
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.397.500	37.939.005	(28.458.495)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.970.900	158.556.100	(3.414.800)
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	-
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.900.000	101.900.000	-
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.560.000	31.434.080	(34.125.920)
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.023.630	78.023.630	-
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.270.000	15.270.000	-
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	44.416.700	22.511.000	(21.905.700)
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	49.925.000	49.925.000	-
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	7.935.000	7.935.000	-
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	90.208.300	90.208.300	-
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	41.953.180	23.910.580	(18.042.600)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.930.000	8.140.000	(1.790.000)
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	26.775.612	26.775.612	-
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	9.909.900	6.602.100	(3.307.800)
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.913.420	3.913.420	-
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	71.199.300	59.390.400	(11.808.900)
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	49.977.820	40.178.600	(9.799.220)
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	19.949.300	14.107.500	(5.841.800)
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	49.939.800	45.457.200	(4.482.600)
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	124.145.730	123.695.730	(450.000)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	61.087.100	68.166.900	7.079.800
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	486.641.500	435.153.400	(51.488.100)
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.474.989.040	1.474.989.040	-
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36.000.000	28.702.600	(7.297.400)
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	67.558.480	69.542.580	1.984.100

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.100.000.000	1.100.000.000	-
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.483.614.143	7.219.827.073	(263.787.070)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.703.800	(296.200)
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.712.000	(288.000)
2	08	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	5.000.000	4.240.000	(760.000)
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.668.005.021	3.853.086.819	185.081.798
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.926.000	61.626.000	2.700.000
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.072.520	27.072.520	-
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.979.500	4.979.500	-
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	5.100.000	(900.000)
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.441.800	26.213.880	(26.227.920)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.277.850	38.461.173	(5.816.678)
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.931.218	83.431.218	7.500.000
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.269.000	10.209.000	(55.060.000)
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.528.934	55.028.934	6.500.000
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.870.000	33.370.000	23.500.000
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	38.388.800	27.672.000	(10.716.800)
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	100.000.000	(200.000.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.441.680	65.837.420	(3.604.260)
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.554.400	115.037.300	(517.100)
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.763.960	72.002.960	(15.761.000)
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.851.220	14.716.900	(4.134.320)
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi	13.946.000	11.186.500	(2.759.500)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
					Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.398.200	7.878.380	(1.519.820)
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.174.800	8.645.300	(3.529.500)
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.939.000	7.440.000	(2.499.000)
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.451.400	4.589.200	(862.200)
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	60.459.200	28.243.750	(32.215.450)
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	37.697.500	32.020.000	(5.677.500)
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	-
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.880.600	15.684.000	(6.196.600)
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	82.170.000	78.360.000	(3.810.000)
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.217.560	17.077.560	(1.140.000)
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	203.716.100	176.712.800	(27.003.300)
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	70.020.000	69.840.000	(180.000)
2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	20.931.010	20.931.010	-
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	14.397.600	10.528.000	(3.869.600)
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	122.444.840	99.671.600	(22.773.240)
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	77.278.800	70.549.000	(6.729.800)
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	53.000.000	51.202.800	(1.797.200)
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	2.000.000	1.700.000	(300.000)
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	127.000.000	124.750.000	(2.250.000)
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	95.196.000	87.598.000	(7.598.000)
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.800.000	70.520.000	(280.000)
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	14.700.000	7.350.000	(7.350.000)
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	90.226.000	90.226.000	-
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	144.000.000	142.924.000	(1.076.000)
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34.300.000	34.300.000	-
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	476.724.000	476.222.000	(502.000)
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	999.780	899.500	(100.280)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	31.150.000	30.702.000	(448.000)
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1.000.000	460.500	(539.500)
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	51.400.000	50.894.000	(506.000)
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	7.917.200	6.807.500	(1.109.700)
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	9.999.050	9.999.050	-
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	46.577.600	32.791.200	(13.786.400)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	10.000.000	8.520.000	(1.480.000)
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	266.000.000	263.500.000	(2.500.000)
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	318.200.000	315.602.000	(2.598.000)
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.804.684.146,68	10.691.440.289,69	(113.243.856,99)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	195.000	195.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.005.000	1.725.000	(280.000)
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.700.000	(300.000)
2	09	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	4.338.000	(662.000)
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.587.459.486	6.672.726.769	85.267.283
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.796.000	74.796.000	-
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200.000	-	(200.000)
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	200.000	200.000	-
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.800.000	-	(30.800.000)
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	15.200.000	(4.800.000)
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.800	7.500.800	-
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.220	43.374.420	(6.625.800)
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.900	14.999.900	-
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.999.680	5.229.680	(770.000)
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.941.800	24.970.900	(24.970.900)
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	64.007.260	53.650.040	(10.357.220)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.847.200	68.786.400	(10.060.800)
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	750.000	-
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.598.398	88.598.398	-
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.560.000	14.209.400	(68.350.600)
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	150.000.000	-
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.946.000	24.946.000	-
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	19.985.900	24.548.200	4.562.300
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30.000.000	29.520.000	(480.000)
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000	46.630.500	(3.369.500)
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	29.990.300	22.872.600	(7.117.700)
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	59.997.990	45.565.990	(14.432.000)
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	40.000.000	50.581.400	10.581.400
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	34.999.900	27.638.100	(7.361.800)
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	99.999.800	91.890.300	(8.109.500)
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	25.000.100	19.016.200	(5.983.900)
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	50.000.300	38.636.100	(11.364.200)
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	124.327.000	(673.000)
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	34.999.900	27.000.400	(7.999.500)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	260.235.720	435.231.592	174.995.872
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100.000.000	98.860.000	(1.140.000)
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	49.997.650	49.997.650	-
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	7.500.000	7.500.000	-
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	7.500.000	6.300.000	(1.200.000)
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	15.000.000	12.543.200	(2.456.800)
3	27	02	2.04	0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	7.529.600	4.862.800	(2.666.800)
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	7.498.000	7.498.000	-
3	27	02	2.05	0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	7.500.000	6.300.000	(1.200.000)
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	7.500.400	-	(7.500.400)
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	7.500.000	6.360.000	(1.140.000)
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15.004.250	15.004.250	-
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	110.000.000	160.000.000	50.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	50.000.000	42.530.000	(7.470.000)
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	60.000.000	51.000.000	(9.000.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	75.000.061	75.000.061	-
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	75.000.235	75.000.235	-
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	40.000.332	-	(40.000.332)
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5.000.000	-	(5.000.000)
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	75.000.000	75.000.000	-
3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.000.000	5.000.000	-
3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	74.872.200	68.811.400	(6.060.800)
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	10.015.000	10.015.000	-
3	27	03	2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	9.954.900	8.804.400	(1.150.500)
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	14.993.700	12.712.200	(2.281.500)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	7.878.600	5.181.800	(2.696.800)
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	25.000.000	22.726.200	(2.273.800)
3	27	04	2.01	0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	20.017.200	22.776.900	2.759.700
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.998.500	15.859.500	(4.139.000)
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	1.500.000	1.200.000	(300.000)
3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	10.004.800	7.714.600	(2.290.200)
3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	9.735.400	8.622.000	(1.113.400)
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	10.304.200	-	(10.304.200)
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	25.000.000	24.668.000	(332.000)
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	110.002.200	110.002.200	-
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	7.500.000	6.580.000	(920.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	10.000.000	10.000.000	-
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	7.499.900	6.453.500	(1.046.400)
3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	8.815.500	7.005.500	(1.810.000)
3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	48.031.100	22.138.800	(25.892.300)
3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	15.875.000	6.625.000	(9.250.000)
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	10.000.000	8.083.200	(1.916.800)
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			
3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	15.000.000	15.000.000	-
3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	15.000.000	1.960.000	(13.040.000)
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25.000.000	25.000.000	-
3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	25.002.500	24.496.100	(506.400)
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	9.995.500	6.544.600	(3.450.900)
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	9.985.600	7.768.100	(2.217.500)
3	27	06	2.01	0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	24.999.660	13.180.900	(11.818.760)
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	10.003.500	6.620.500	(3.383.000)
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			
3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	10.004.400	1.500.000	(8.504.400)
3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	9.988.400	9.748.400	(240.000)
3	27	06	2.02	0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	9.998.800	4.605.400	(5.393.400)
3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	9.990.100	5.833.800	(4.156.300)
3	27	06	2.02	0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	7.500.000	7.500.000	-
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	7.507.300	5.137.000	(2.370.300)
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	7.490.800	4.335.400	(3.155.400)
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	206.796.100	82.248.600	(124.547.500)
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	794.998.105	910.120.105	115.122.000
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	49.880.600	37.696.100	(12.184.500)
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	74.999.200	73.639.200	(1.360.000)
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	-	28.500.000	28.500.000
3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	34.999.200	27.514.600	(7.484.600)
3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	9.999.000	6.400.000	(3.599.000)
					Dinas Lingkungan Hidup	34.861.588.332	35.301.628.987	440.040.655
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	11	01	2.01		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	-	(2.000.000)
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-
2	11	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	3.200.000	(1.800.000)
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.031.358.473	8.809.984.244	778.625.771
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.461.582.600	11.892.325.143	(1.569.257.458)
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.014.600	30.014.600	-
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.728.320	51.728.320	-
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.140.600	47.961.840	(1.178.760)
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.002.660	5.094.260	(908.400)
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.596.700	16.588.900	(23.007.800)
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	28.201.800	28.201.800	-
2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177.377.470	154.917.370	(22.460.100)
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.872.000	445.872.000	-
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.560.000	18.603.050	(56.956.950)
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.728.901.589	4.110.306.871	(618.594.718)
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.360.000	24.360.000	-
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	220.491.000	162.328.300	(58.162.700)
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	35.568.010	30.769.110	(4.798.900)
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	34.999.580	33.632.780	(1.366.800)
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	34.999.680	19.263.280	(15.736.400)
2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	69.572.800	56.742.400	(12.830.400)
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	418.500.800	416.686.000	(1.814.800)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	34.940.760	33.582.760	(1.358.000)
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	89.485.650	164.266.650	74.781.000
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	32.139.500	18.999.700	(13.139.800)
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.159.300.000	1.704.994.672	545.694.672
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3			
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	34.580.000	23.797.800	(10.782.200)
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	24.185.100	16.224.700	(7.960.400)
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	23.935.200	11.623.000	(12.312.200)
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	68.167.600	68.167.600	-
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	54.501.440	73.926.440	19.425.000
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	29.394.800	27.854.800	(1.540.000)
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	64.643.600	51.963.400	(12.680.200)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	6.780.000	6.780.000	-
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	43.064.300	37.563.500	(5.500.800)
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.826.852.300	1.818.647.900	(8.204.400)
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.512.123.480	1.564.856.920	52.733.440
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.612.105.920	2.426.644.160	814.538.240
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	271.560.000	890.154.717	618.594.717
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.732.544.026	5.836.301.898	103.757.872
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	500.000	(1.500.000)
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	500.000	(1.500.000)
2	12	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.079.642.615	4.362.255.647	282.613.032
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.326.000	50.836.000	4.510.000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.990.000	1.990.000	-
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	428.904.091	428.904.091	-
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.718.340	100.243.440	(9.474.900)
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.880	17.929.120	(12.070.760)
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	4.000.000	(2.000.000)
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.877.600	30.210.000	(19.667.600)
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	61.617.000	61.617.000	-
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.139.000	5.256.900	(19.882.100)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	-
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000	46.800.000	-
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.427.300	3.427.300	-
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.555.500	5.500.000	(62.055.500)
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.015.500	53.015.500	-
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.140.000	29.140.000	-
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	9.990.000	9.990.000	-
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	136.283.200	136.283.200	-
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk			
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	35.451.000	35.451.000	-
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	73.203.600	53.186.600	(20.017.000)
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIIL			
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	10.424.800	10.424.800	-
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	26.133.400	15.460.000	(10.673.400)
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.450.500	14.450.500	-
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.177.000	10.477.000	(1.700.000)
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	22.135.200	18.669.400	(3.465.800)
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	330.067.600	321.624.700	(8.442.900)
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan			
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	11.074.900	4.159.700	(6.915.200)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
					Dinas Perhubungan	26.978.330.575	36.847.712.204	9.869.381.629
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	-
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-
2	15	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.000.000	3.000.000	-
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.903.467.116	7.295.808.936	392.341.820
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	397.576.000	267.976.000	(129.600.000)
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.800.000	46.800.000	-
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.232.000	45.232.000	-
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.992.750	47.374.380	17.381.630
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.602.000	86.861.000	(4.741.000)
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	9.320.000	3.320.000
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.901.600	99.803.200	49.901.600
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.092.529.700	1.083.822.300	(8.707.400)
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	145.367.300	145.367.300	-
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.767.550	146.767.550	-
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	2.000.000	1.000.000
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.210.333.599	5.210.333.599	-
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.715.200	30.000.000	(61.715.200)
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.161.460	501.129.560	(31.900)
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	400.000.000	-
2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.110.000	45.110.000	-
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	99.883.500	79.229.000	(20.654.500)
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.839.965.120	18.595.864.709	8.755.899.589

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.049.978.370	1.449.978.370	400.000.000
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	138.549.610	92.138.000	(46.411.610)
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	177.423.300	213.323.300	35.900.000
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	460.974.400	946.473.000	485.498.600
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.416.860.674	6.714.800.842	297.940.168
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.900	1.800.000	(199.900)
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.900	1.800.000	(199.900)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	16	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.999.600	4.560.000	(439.600)
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.957.094	4.037.313.412	36.356.318
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.226.000	62.226.000	-
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.991.300	2.991.300	-
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.996.940	29.996.940	-
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.700	9.999.700	-
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	-
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.717.300	14.916.300	(14.801.000)
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.292.300	38.292.300	-
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.000.000	320.000.000	-
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.560.000	10.489.450	(58.070.550)
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000	240.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	-
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	58.000.000	56.780.000	(1.220.000)
2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	9.984.900	33.144.300	23.159.400
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	537.591.600	949.671.000	412.079.400
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	227.480.740	223.980.740	(3.500.000)
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	148.822.300	127.679.900	(21.142.400)
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	480.260.300	448.098.500	(32.161.800)
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	19.497.600	12.129.000	(7.368.600)
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	54.476.800	46.232.500	(8.244.300)
2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	6.024.500	4.344.500	(1.680.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.999.600	6.167.500	(8.832.100)
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	19.982.300	4.187.500	(15.794.800)
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9.819.279.818	8.838.317.821	(980.961.997)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.700.000	(300.000)
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.700.000	(300.000)
2	17	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	4.260.000	(740.000)
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.595.663.018	4.707.097.171	111.434.153
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	142.394.000	142.394.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	-
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.853.650	86.906.780	(36.946.870)
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.765.000	14.999.900	(10.765.100)
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.552.820	5.751.660	(801.160)
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.336.290	68.155.570	(68.180.720)
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.686.000	63.124.000	(31.562.000)
2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	232.316.940	182.996.940	(49.320.000)
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.001.000	6.001.000	-
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.500.100	215.500.100	-
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.310.400	235.110.200	(76.200.200)
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.320.000	34.912.000	(32.408.000)
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	70.000.000	-
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.000.000	10.000.000	(225.000.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.670.000	19.980.000	(10.690.000)
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	23.506.000	(6.494.000)
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	30.000.000	20.348.500	(9.651.500)
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	-	(10.000.000)
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	8.187.500	(1.812.500)
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	75.000.000	41.052.450	(33.947.550)
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	-	50.000.000	50.000.000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10.000.000	9.130.300	(869.700)
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	590.000.000	493.693.860	(96.306.140)
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	50.000.000	36.745.840	(13.254.160)
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	500.000.000	500.000.000	-
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	74.000.000	47.582.720	(26.417.280)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	9.817.300	9.817.300	-
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.000.000	2.160.000	(7.840.000)
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			
3	30	02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	20.000.000	12.933.000	(7.067.000)
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.023.000.000	792.000.000	(231.000.000)
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	431.404.000	415.404.000	(16.000.000)
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60.000.100	35.632.900	(24.367.200)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	20.000.000	8.276.200	(11.723.800)
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	20.000.000	10.992.830	(9.007.170)
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	20.000.000	20.000.000	-
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.000.000	26.699.400	(3.300.600)
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.000.000	15.755.200	(4.244.800)
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.000.600	27.087.500	(2.913.100)
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.000.000	1.160.000	(3.840.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000	10.000.000	-
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	33.767.600	50.767.600	17.000.000
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	30.000.000	19.023.500	(10.976.500)
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	86.243.000	-	(86.243.000)
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	20.000.000	20.000.000	-
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	203.678.000	227.634.700	23.956.700
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	20.000.000	17.137.200	(2.862.800)
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	-	(20.000.000)
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.497.319.835,05	7.170.047.292,06	(327.272.542,99)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.494.200	1.258.500	(235.700)
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.284.422.244	5.319.307.062	34.884.818
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	159.990.000	160.190.000	200.000
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.800.000	-	(22.800.000)
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.952.450	5.952.450	-
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.607.275	159.605.975	(1.300)
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.209.760	2.865.720	(344.040)
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.031.600	4.268.300	(763.300)
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.369.500	16.648.560	(16.720.940)
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.440.000	21.440.000	-
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	13.900.300	13.900.300	-
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.783.800	41.783.800	-
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.763.970	67.766.170	(11.997.800)
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	-
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	508.400.000	471.470.528	(36.929.472)
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000	34.000.000	-
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.973.200	2.639.700	(333.500)
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.550.566	18.214.866	(70.335.700)
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.976.770	93.976.770	-
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.164.000	27.119.000	16.955.000
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.660.000	44.660.000	-
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	22.962.820	12.635.920	(10.326.900)
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	24.540.600	13.850.900	(10.689.700)
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	25.928.200	23.632.800	(2.295.400)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	138.773.240	95.035.240	(43.738.000)
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	39.884.700	28.219.800	(11.664.900)
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko Terintegrasi secara Elektronik	94.653.500	65.575.951	(29.077.549)
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	35.005.600	32.890.800	(2.114.800)
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	68.490.200	66.767.200	(1.723.000)
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24.859.800	16.837.400	(8.022.400)
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	289.072.200	223.250.900	(65.821.300)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	74.056.340	54.470.280	(19.586.060)
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	42.103.000	28.312.400	(13.790.600)
					Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	22.478.460.826	23.577.636.103	1.099.175.277
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000	7.640.000	(1.360.000)
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.103.543.049	7.701.051.856	597.508.807
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.436.206.000	1.968.306.000	(467.900.000)
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.500.000	-	(32.500.000)
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.500	4.997.500	-
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.801.000	18.801.000	-
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.370.710	158.850.510	(1.520.200)
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.999.140	27.899.040	(3.100.100)
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.042.410	5.113.040	(929.370)
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.789.910	76.308.200	(23.481.710)
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	-
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.025.020.565	1.025.020.565	-
2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	-
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.137.480	107.737.480	10.600.000
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.679.550	9.000.000	(85.679.550)
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.999.550	49.999.550	-
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.630.000	29.630.000	-
2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.992.000	99.992.000	-
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	243.748.020	182.622.920	(61.125.100)
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	35.966.600	35.966.600	-
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	25.960.200	25.960.200	-
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	19.995.600	18.760.100	(1.235.500)
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	50.003.100	46.384.700	(3.618.400)
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	189.989.200	189.989.200	-
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	300.000.000	300.000.000	-
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.099.976.906	2.476.976.906	1.377.000.000
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	70.366.000	69.999.400	(366.600)
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	149.997.800	149.470.000	(527.800)
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	250.071.800	250.071.800	-
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	49.990.000	49.990.000	-
2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	10.266.200	8.451.400	(1.814.800)
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	19.994.200	18.357.800	(1.636.400)
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	900.000.000	900.000.000	-
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	230.000.000	25.000.000	(205.000.000)
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	19.972.000	19.825.000	(147.000)
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	74.999.400	74.999.400	-
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	150.000.000	150.000.000	-
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	7.500.000	7.500.000	-
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	25.000.000	24.640.000	(360.000)
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.799.999.660	2.748.177.260	(51.822.400)
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	26.196.400	26.196.400	-
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	42.494.590	42.494.590	-
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	100.000.000	200.000.000	100.000.000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	49.984.300	49.984.300	-
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	19.867.800	19.867.800	-
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	14.991.500	14.991.500	-
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	74.960.420	53.806.720	(21.153.700)
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	99.999.800	69.124.000	(30.875.800)
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	39.978.320	21.057.920	(18.920.400)
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	237.870.920	237.870.920	-
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	80.098.800	24.808.400	(55.290.400)
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	571.590.140	571.590.140	-
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	33.001.340	33.001.340	-
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	175.000.000	175.000.000	-
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.000.000.000	1.000.000.000	-
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	56.998.100	56.998.100	-
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	50.626.000	50.626.000	-
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	240.720.850	240.720.850	-
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	19.991.200	19.519.000	(472.200)
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	49.986.400	49.686.400	(300.000)
3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	36.334.100	50.000.000	13.665.900
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	50.151.700	50.151.700	-
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	397.734.200	347.812.200	(49.922.000)
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	499.999.996	714.049.996	214.050.000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	49.990.000	48.041.600	(1.948.400)
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	199.997.000	174.495.400	(25.501.600)
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	49.903.500	48.720.000	(1.183.500)
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	65.987.900	52.031.400	(13.956.500)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.149.837.454	4.897.896.930	(251.940.524)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.998.000	998.000	(1.000.000)
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.998.000	998.000	(1.000.000)
2	23	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.992.000	4.992.000	-
2	23	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.061.098.944	4.101.442.220	40.343.276
2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.126.000	54.126.000	-
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.898.000	2.898.000	-
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.999.320	24.999.320	-
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.966.000	2.966.000	-
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.982.000	4.682.000	(1.300.000)
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.976.200	19.041.300	(20.934.900)
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.480.380	32.480.380	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000	102.000.000	-
2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.990.000	4.990.000	-
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.320.000	69.320.000	(3.000.000)
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.660.000	33.660.000	-
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.276.430	95.276.430	-
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.872.000	-	(199.872.000)
2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.990	9.999.990	-
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	14.980.500	11.311.500	(3.669.000)
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.996.900	19.996.900	-
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	9.975.600	9.975.600	-
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.986.700	8.786.700	(1.200.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	29.975.400	27.975.400	(2.000.000)
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	19.807.950	19.807.950	-
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	14.996.030	11.596.030	(3.400.000)
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	89.998.700	62.802.400	(27.196.300)
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.000.000	6.705.000	(3.295.000)
2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	9.987.200	5.245.900	(4.741.300)
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	5.000.000	5.000.000	-
2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	4.999.100	4.999.100	-
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	21.864.000	21.864.000	-
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	11.466.200	11.466.200	-

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38.873.010	27.649.110	(11.223.900)
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	75.330.800	66.879.400	(8.451.400)
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			
2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	9.966.100	9.966.100	-
					Dinas Perikanan	9.384.640.098	8.996.742.792	(387.897.306)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.993.860	1.993.860	-
3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-
3	25	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	5.000.000	5.000.000	-
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.436.429.481	4.498.213.126	61.783.645
3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.636.000	67.236.000	(50.400.000)
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.600.000	21.600.000	-
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.312.400	8.312.400	-
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.499.100	41.499.100	-
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	-
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.989.680	5.989.680	-
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.075.100	131.239.100	(75.836.000)
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
3	25	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	206.596.400	193.361.600	(13.234.800)
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.800.000	97.800.000	-
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.385.200	22.551.999	(48.833.201)
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.000.000	145.000.000	-
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.030.000	-	(125.030.000)
3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.270.000	41.270.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	68.806.200	68.806.200	-
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	58.721.600	230.094.350	171.372.750
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	4.000.000	4.000.000	-
3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	354.442.000	354.442.000	-
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	44.999.700	26.558.900	(18.440.800)
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.616.300	73.094.800	(5.521.500)
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.370.432.769	1.302.756.969	(67.675.800)
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	105.581.300	87.724.500	(17.856.800)
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	235.000.000	193.554.600	(41.445.400)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	86.322.400	54.760.400	(31.562.000)
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	63.676.200	37.785.400	(25.890.800)
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	60.983.600	60.983.600	-
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	227.596.850	177.515.750	(50.081.100)
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.075.843.958	1.026.598.458	(49.245.500)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.366.992.274	7.605.064.286	238.072.012
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.800	1.850.800	(149.000)
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800	1.850.800	(149.000)
2	07	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	5.000.200	3.799.200	(1.201.000)
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.716.427.448	5.766.290.030	49.862.582
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.606.000	66.606.000	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.113.106	20.113.106	-
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.875.120	49.875.120	-
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.997.030	49.997.030	-
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.390	13.598.390	(1.401.000)
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	5.100.000	(900.000)
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.970.000	24.970.000	-
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	32.285.700	32.285.700	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.166.000	52.903.670	(2.262.330)
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.560.000	165.560.000	-
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.800.000	3.800.000	-
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.286.165	8.073.765	(61.212.400)
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.468.315	22.468.315	-
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	600.000.000	400.000.000
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.820.000	39.820.000	-
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	34.843.200	23.600.800	(11.242.400)
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	47.284.840	47.284.840	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	148.232.000	147.507.500	(724.500)
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	20.632.200	15.954.000	(4.678.200)
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	29.973.800	26.420.300	(3.553.500)
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	59.340.730	51.378.330	(7.962.400)
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	5.335.430	4.883.330	(452.100)
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	4.999.700	4.379.300	(620.400)
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	39.998.320	22.888.000	(17.110.320)
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	9.999.800	6.956.700	(3.043.100)
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	4.987.020	4.597.020	(390.000)
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	7.163.000	7.163.000	-
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.912.920	25.093.600	(9.819.320)
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.040.000	-	(2.040.000)
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.177.000	11.522.200	345.200
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	54.715.200	44.900.000	(9.815.200)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	12.042.000	5.673.400	(6.368.600)
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	70.106.810	50.232.510	(19.874.300)
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	192.359.530	158.074.930	(34.284.600)
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.974.800	2.622.000	(1.352.800)
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1.999.520	988.220	(1.011.300)
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	20.095.560	10.657.860	(9.437.700)
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2.404.820	1.324.520	(1.080.300)
					Sekretariat Daerah	47.954.667.534	54.633.365.672	6.678.698.138
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	440.000	(1.560.000)
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-
4	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah	5.000.000	4.415.000	(585.000)
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.032.671.848	18.283.026.348	1.250.354.500
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.956.000	124.956.000	-
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.985.400	74.985.400	-
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.967.200	383.898.960	58.931.760
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.619.800	98.327.300	14.707.500
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10.000.000	10.000.000	-
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.674.995.600	3.548.101.600	1.873.106.000
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.345.972.100	1.805.509.700	459.537.600
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	350.000.000	350.000.000
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	280.739.100	762.968.601	482.229.501
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	-
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.815.550.000	1.815.550.000	-

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.496.880	529.496.880	270.000.000
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.807.912.002	1.792.274.802	(15.637.200)
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.560.000	252.560.000	80.000.000
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	848.266.000	1.023.266.000	175.000.000
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	24.926.000	24.926.000	-
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.336.200	197.336.200	111.000.000
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.946.000	851.269.000	721.323.000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	200.000.000	-
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59.800.000	-	(59.800.000)
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.000.000	10.000.000	-
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	-
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	255.569.850	510.837.850	255.268.000
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	207.128.189	447.405.589	240.277.400

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	43.173.020	88.180.520	45.007.500
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi			
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	49.999.500	32.465.500	(17.534.000)
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	94.993.800	53.490.300	(41.503.500)
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	73.380.400	49.557.200	(23.823.200)
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	19.999.500	18.353.500	(1.646.000)
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5.000.000	4.760.000	(240.000)
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	209.879.150	260.915.037	51.035.887
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	389.996.700	439.260.505	49.263.805
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	149.957.300	151.000.000	1.042.700
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan			
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	54.606.750	35.203.640	(19.403.110)
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	104.699.990	66.896.490	(37.803.500)
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.167.499.850	1.277.840.750	110.340.900
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.606.788.700	1.573.767.900	(33.020.800)
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	9.071.600.000	9.051.794.500	(19.805.500)
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.684.100.000	5.277.192.500	593.092.500
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	223.291.400	380.693.400	157.402.000

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	515.456.200	504.068.700	(11.387.500)
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	49.424.200	78.610.300	29.186.100
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	495.000.000	322.855.270	(172.144.730)
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10.000.000	10.000.000	-
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	115.499.900	97.757.500	(17.742.400)
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	129.999.800	140.026.200	10.026.400
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	585.974.820	471.632.860	(114.341.960)
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	49.999.685	40.629.570	(9.370.115)
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	42.068.500	22.150.100	(19.918.400)
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	43.999.900	34.231.000	(9.768.900)
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	30.000.000	16.029.000	(13.971.000)
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	156.253.100	144.756.300	(11.496.800)
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	148.011.600	151.041.800	3.030.200
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	17.116.300	11.040.700	(6.075.600)
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	29.999.700	17.940.800	(12.058.900)
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	24.999.700	17.875.200	(7.124.500)
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	117.999.900	83.297.400	(34.702.500)
					Sekretariat DPRD	47.543.564.271	50.200.618.898	2.657.054.627
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02				SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.700.000	(300.000)
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	840.000	(160.000)
4	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	5.000.000	4.240.000	(760.000)
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.432.026.166	5.609.686.553	177.660.387
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.506.000	64.506.000	-
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.500.000	-	(32.500.000)
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.993.900	16.217.500	6.223.600
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.826.100	193.822.900	82.996.800

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.999.700	131.278.300	31.278.600
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.396.780	134.344.470	47.947.690
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.100.000	10.100.000	-
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.984.800	78.344.800	(11.640.000)
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.908.900	77.340.900	(47.568.000)
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	825.500.000	825.500.000
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	71.435.100	71.435.100	-
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	20.000.000	-
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.650.000	34.650.000	-
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.000.000	408.000.000	-
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000	9.600.000	-
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.051.000	71.528.600	(19.522.400)
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.885.950	174.885.950	-
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.978.200	129.978.200	-
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.222.980.955	17.276.340.955	1.053.360.000

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	45.000.000	45.000.000	-
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000	150.000.000	60.000.000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD			
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	400.000.000	339.200.000	(60.800.000)
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	597.218.400	298.419.800	(298.798.600)
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	375.374.400	287.324.600	(88.049.800)
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	318.153.200	85.402.200	(232.751.000)
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	727.758.600	492.676.300	(235.082.300)
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000	270.000.000	(90.000.000)
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	40.000.000	36.000.000	(4.000.000)
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	1.280.900.000	1.872.700.000	591.800.000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	19.977.387.120	20.929.581.570	952.194.450
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	99.949.000	49.974.200	(49.974.800)
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	7.905.262.909	7.435.441.611	(469.821.298)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01				PERENCANAAN			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	01	01	2.01		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.680.000	(320.000)
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.680.000	(320.000)
5	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah	5.000.000	4.280.000	(720.000)
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.224.353.078	5.094.024.187	(130.328.891)
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.246.000	54.246.000	-
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.900.000	-	(11.900.000)
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.974.800	4.974.800	-
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.050.770	59.050.770	-
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.229.390	8.303.841	(925.549)
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.158.900	20.958.900	(1.200.000)
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.025.200	190.027.450	90.002.250
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	60.000.000	-
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	20.000.000	-
5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.460.800	36.460.800	-
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.700.000	-
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.650.731	180.650.731	-
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	-
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.462.000	2.395.800	(66.200)
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.160.000	40.106.000	(37.054.000)
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	60.550.000	550.000
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000	29.000.000	-
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.192.200	41.373.422	1.181.222
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	531.291.600	491.740.700	(39.550.900)
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	45.136.200	32.082.300	(13.053.900)
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	88.395.600	65.377.300	(23.018.300)
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	41.351.500	28.971.700	(12.379.800)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	110.649.800	87.190.810	(23.458.990)
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	110.191.900	98.413.600	(11.778.300)
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.402.940	31.731.070	(26.671.870)
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000	4.250.000	(750.000)
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000	4.250.000	(750.000)
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	41.597.000	22.070.500	(19.526.500)
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	108.132.400	56.308.800	(51.823.600)
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000	8.500.000	(1.500.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.806.800	4.803.400	(2.003.400)
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	150.167.600	106.523.000	(43.644.600)
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.800.000	5.797.000	(3.000)
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	59.600.000	39.954.480	(19.645.520)
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44.000.000	22.000.000	(22.000.000)
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	59.600.000	56.619.000	(2.981.000)
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.000.000	33.352.720	(28.647.280)
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	61.500.000	55.350.000	(6.150.000)
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	133.292.200	121.897.400	(11.394.800)
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	104.462.000	93.401.530	(11.060.470)
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	29.321.500	22.393.600	(6.927.900)
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	117.704.388.875	111.305.397.953	(6.398.990.922)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02				KEUANGAN			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.800.000	(200.000)
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.800.000	(200.000)
5	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	5.000.000	4.200.000	(800.000)
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.548.611.589	86.951.591.253	(5.597.020.336)
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.337.520.000	1.337.520.000	-
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.000.000	14.000.000	-
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.991.250	19.991.250	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.009.580	10.009.580	-
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	374.994.880	374.994.880	-
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	449.990.150	404.984.750	(45.005.400)
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.980.500	111.880.000	11.899.500
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.915.300	215.921.750	(33.993.550)
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	94.388.690	79.544.690	(14.844.000)
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	363.432.950	328.432.950	(35.000.000)
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	-
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.751.205.540	1.751.205.540	-
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.808.000	106.420.600	(8.387.400)
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.453.600.000	1.453.600.000	-
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.514.300	31.380.056	(74.134.244)
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.000.500	232.528.000	9.527.500
5	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	343.915.400	435.382.328	91.466.928
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	973.119.356	973.119.356	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.970.000	58.050.000	8.080.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	95.676.600	86.631.500	(9.045.100)
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	91.996.850	82.282.300	(9.714.550)
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	840.445.700	806.858.700	(33.587.000)
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	840.445.700	815.233.700	(25.212.000)
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	387.506.220	346.247.380	(41.258.840)
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	254.891.900	116.630.300	(138.261.600)
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	195.363.200	153.028.700	(42.334.500)
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	138.273.300	99.383.500	(38.889.800)
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	49.995.100	26.334.500	(23.660.600)
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	78.984.200	65.386.200	(13.598.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	168.045.000	184.345.000	16.300.000
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24.268.100	18.868.500	(5.399.600)
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	156.355.300	153.231.300	(3.124.000)
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	69.000.010	40.934.900	(28.065.110)
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	104.999.600	75.412.400	(29.587.200)
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	249.999.860	190.735.200	(59.264.660)
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	199.999.550	102.699.200	(97.300.350)
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	29.999.700	19.864.900	(10.134.800)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	9.999.600	6.576.000	(3.423.600)
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	29.988.300	18.546.900	(11.441.400)
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	29.999.800	18.681.900	(11.317.900)
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	5.000.000.000	-
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	308.267.600	254.212.500	(54.055.100)
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.982.200	12.461.700	(7.520.500)
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	54.971.800	32.192.100	(22.779.700)
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	149.989.400	88.726.000	(61.263.400)
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	739.971.140	634.341.340	(105.629.800)
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	294.991.800	257.716.600	(37.275.200)
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	889.542.400	771.998.820	(117.543.580)
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	149.988.320	426.754.900	276.766.580
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	70.000.000	68.400.000	(1.600.000)
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	481.983.430	480.606.360	(1.377.070)
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	494.986.000	403.518.800	(91.467.200)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	249.970.800	213.275.200	(36.695.600)
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	505.000.100	614.412.300	109.412.200
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	254.319.420	847.582.660	593.263.240
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	489.186.440	523.337.160	34.150.720
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	212.312.100	161.101.000	(51.211.100)
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	199.984.350	175.351.650	(24.632.700)
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	1.871.991.300	1.598.066.000	(273.925.300)
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	128.748.800	84.572.000	(44.176.800)
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	494.999.900	320.500.900	(174.499.000)
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	17.303.931.617	14.422.425.506	(2.881.506.111)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03				KEPEGAWAIAN			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.520	1.687.520	(312.000)
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.520	1.687.520	(312.000)
5	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	4.999.520	4.247.520	(752.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.673.031.865	5.546.237.964	(126.793.901)
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.546.265.102	6.587.991.102	(1.958.274.000)
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.150.000	-	(17.150.000)
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.977.600	1.977.600	-
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.792.150	48.792.150	-
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.003.500	68.484.100	(11.519.400)
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.017.020	24.454.020	(2.563.000)
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	5.860.000	(140.000)
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.882.520	19.935.360	(19.947.160)
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	-
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.728.000	59.728.000	-
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.658.000	43.797.800	(28.860.200)
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.989.000	19.989.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.380.000	11.380.000	-
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	87.257.500	43.688.000	(43.569.500)
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	265.490.000	214.095.800	(51.394.200)
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	14.904.500	7.366.500	(7.538.000)
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	19.851.000	9.868.800	(9.982.200)
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	17.200.000	14.620.000	(2.580.000)
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	14.969.800	7.777.200	(7.192.600)
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	33.034.800	16.596.000	(16.438.800)
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	559.929.450	421.193.850	(138.735.600)
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	188.366.200	185.256.200	(3.110.000)
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9.981.900	6.096.300	(3.885.600)
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49.678.000	30.052.800	(19.625.200)
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	49.999.700	27.243.500	(22.756.200)
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	9.994.700	5.447.500	(4.547.200)
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	24.444.700	12.542.900	(11.901.800)
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.343.556.050	971.930.500	(371.625.550)
					Inspektorat	14.869.881.093,73	15.358.512.704,33	488.631.610,60
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	-
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-
6	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.040.000	4.040.000	-
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.002.235.274	6.254.369.723	252.134.449
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.516.000	74.726.000	(15.790.000)
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	91.639.250	53.580.000	(38.059.250)
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.506.067.800	1.330.763.400	(175.304.400)
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.488.900	5.476.500	(12.400)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.811.480	86.691.900	41.880.420
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.632.500	6.632.500	-
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.352.100	17.352.100	-
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	-
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.257.300	655.852.200	334.594.900
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	180.991.230	176.290.930	(4.700.300)
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	530.652.760	958.826.260	428.173.500
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.077.600	156.301.632	58.224.032
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.563.000	4.288.300	(36.274.700)
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.602.510	142.602.510	-
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.515.000	24.515.000	-
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000	112.000.000	(93.000.000)
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	123.500.000	26.860.000	(96.640.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.656.184.630	1.245.411.410	(410.773.220)
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	106.500.000	209.070.000	102.570.000
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	397.369.700	331.556.700	(65.813.000)
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	273.959.000	352.033.100	78.074.100
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	252.185.800	268.384.800	16.199.000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	213.123.600	195.001.200	(18.122.400)
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	235.253.800	87.150.000	(148.103.800)
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	266.682.600	272.310.800	5.628.200
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	792.375.000	521.160.000	(271.215.000)
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi			
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	27.835.000	260.983.000	233.148.000
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	725.846.760	897.985.740	172.138.980
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	438.922.500	373.763.500	(65.159.000)
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	28.700.000	233.533.500	204.833.500
					Kecamatan Tarakan Tengah	14.464.865.198	15.705.805.040	1.240.939.842
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.700.000	(300.000)
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.700.000	(300.000)
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.999.520	4.253.520	(746.000)
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.412.158.798	9.568.184.170	156.025.372
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.606.000	111.126.000	6.520.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.491.700	10.491.700	-
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.998.400	79.998.400	-
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.169.800	27.152.720	(3.017.080)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	-
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.247.500	49.247.500	-
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.104.900	151.375.250	102.270.350
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.780.000	3.780.000	-
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.000.000	295.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.303.700	123.613.700	(690.000)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.560.000	17.095.200	(78.464.800)
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.202.100	70.202.100	-
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.840.000	234.840.000	200.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000	25.000.000	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.000.000	40.000.000	-
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000	750.000.000	-
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	804.620.000	800.282.000	(4.338.000)
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.131.400.000	3.000.120.000	868.720.000

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.992.500	4.192.500	(800.000)
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24.990.000	22.390.000	(2.600.000)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	301.627.780	301.627.780	-
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	7.772.500	6.432.500	(1.340.000)
					Kecamatan Tarakan Barat	15.192.066.938	16.200.700.207	1.008.633.269
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.700.000	(300.000)
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.700.000	(300.000)
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.999.520	4.259.180	(740.340)
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.946.661.400	10.002.108.009	55.446.609
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.196.000	104.196.000	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.700	4.995.700	-
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.170.420	81.170.420	6.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.900	22.499.900	(2.500.000)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	13.100.000	7.100.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.977.600	10.451.900	(10.525.700)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.027.300	96.623.300	41.596.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	-
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.966.780	273.966.780	-
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.000.000	87.000.000	-
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.560.000	35.555.000	(55.005.000)
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.673.477	43.673.477	-
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.794.101	99.794.101	-
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.400.000	18.400.000	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.498.940	40.498.940	-
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000	750.000.000	-
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	948.353.500	947.306.000	(1.047.500)
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.301.300.000	3.282.600.000	981.300.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.992.500	4.115.000	(877.500)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.000.000	22.600.000	(2.400.000)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	254.999.800	246.646.500	(8.353.300)
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.240.000	(760.000)
					Kecamatan Tarakan Timur	18.220.828.286	18.363.389.155	142.560.869
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.418.500	(581.500)
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.418.500	(581.500)
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	5.000.000	3.018.500	(1.981.500)
7	01	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.644.649.196	12.229.314.245	(415.334.951)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	207.441.000	173.519.220	(33.921.780)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.988.600	1.572.600	(3.416.000)
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.656.770	41.380.720	(8.276.050)
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.052.360	61.591.000	(6.461.360)
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.200	22.482.320	(2.516.880)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	13.600.000	(6.400.000)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.858.900	9.854.100	(10.004.800)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	9.949.260	8.437.620	(1.511.640)
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000	3.150.000	-
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.823.280	280.823.280	-
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.288.000	147.288.000	-
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.455.800	59.426.180	(53.029.620)
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.829.200	43.829.200	-
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.994.000	249.994.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.880.000	23.880.000	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	49.999.000	49.999.000	-
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000	1.050.000.000	-
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.081.365.020	1.072.335.020	(9.030.000)
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.757.800.000	2.474.800.000	717.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.992.500	8.405.250	(1.587.250)
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	34.990.000	31.030.000	(3.960.000)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	296.666.200	283.821.900	(12.844.300)
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	20.000.000	17.000.000	(3.000.000)
					Kecamatan Tarakan Utara	9.396.202.745	9.758.058.862	361.856.117
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.700.000	(300.000)
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.700.000	(300.000)
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.999.700	4.245.360	(754.340)
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.831.766.085	6.933.502.152	101.736.067
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.726.000	84.726.000	-
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.125.000	-	(33.125.000)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.991.300	9.991.300	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.622.140	117.048.400	(21.573.740)
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.993.920	40.493.250	(4.500.670)
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.995.020	13.495.280	(1.499.740)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	5.100.000	(900.000)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.990.600	7.420.700	(7.569.900)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	16.945.800	16.945.800	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	204.000.000	24.000.000
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.980.000	24.980.000	-
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.000.000	57.000.000	-
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.260.780	53.140.720	(26.120.060)
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.996.700	68.461.700	18.465.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.000.000	25.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	450.000.000	450.000.000	-
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	257.320.000	253.826.000	(3.494.000)
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	787.500.000	1.115.540.000	328.040.000
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000	9.650.000	(350.000)
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	4.330.000	(670.000)
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.990.000	13.390.000	(1.600.000)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	229.999.700	224.632.200	(5.367.500)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	15.000.000	12.740.000	(2.260.000)
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.764.402.079	9.243.879.669	479.477.590
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
8	01	01	2.01		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.700.000	(300.000)
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.730.000	(270.000)
8	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah	5.000.000	3.830.000	(1.170.000)
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.287.821.005	3.198.019.485	(89.801.520)
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.116.000	47.646.000	(10.470.000)
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.862.000	7.303.000	(7.559.000)
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	3.500.000	-
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.033.800	2.033.800	-
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.970.760	16.574.540	(3.396.220)
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.714.500	13.357.300	(2.357.200)
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.999.920	5.399.920	(600.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.894.960	24.854.060	(25.040.900)
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.971.300	61.045.100	20.073.800
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	-
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.520.000	93.990.000	(4.530.000)
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.638.640	5.078.640	(62.560.000)
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000	15.500.000	2.500.000
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.210.000	6.210.000	-
8	01	01	2.10	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		45.000.000	45.000.000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.059.086.980	1.051.392.560	(7.694.420)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	37.752.600	32.180.800	(5.571.800)
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	597.746.430	589.370.530	(8.375.900)
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.238.471.184	1.466.825.684	228.354.500
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21.499.900	16.167.700	(5.332.200)
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.207.999.400	1.533.711.450	325.712.050
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	19.999.500	22.929.000	2.929.500
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	585.534.700	623.510.450	37.975.750
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	19.999.500	18.079.500	(1.920.000)
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	79.999.400	73.253.450	(6.745.950)
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24.999.500	22.100.500	(2.899.000)
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	177.560.100	241.086.200	63.526.100

BAB V**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.468.000.000,00	51.001.337.910,77	25.533.337.910,77
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.468.000.000,00	51.001.337.910,77	25.533.337.910,77
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	11.276.719.475,00	9.276.719.475,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	11.276.719.475,00	9.276.719.475,00
	PEMBIAYAAN NETTO	23.468.000.000,00	39.724.618.435,77	16.256.618.435,77
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

BAB VI
P E N U T U P

Demikian Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

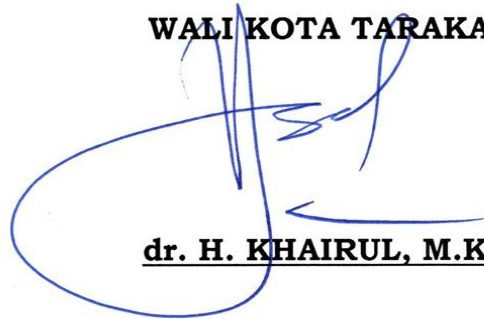
Tarakan, 24 Juli 2025

KETUA DPRD KOTA TARAKAN



MUHAMMAD YUNUS, S.H

WALI KOTA TARAKAN



dr. H. KHAIRUL, M.Kes